LAPORAN PENELITIAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD PADA DESA - DESA DI KECAMATAN LUBUK ALUNG DATI II PADANG PARIAMAN

Oleh

Drs. Didin Tohidin
(Ketua Tim Peneliti)

Penelitian ini Dibiayai dengan dana:
Proyek Operasi Perawatan dan Fasilitas IKIP Padang
Tahun Anggaran 1992/1993
Surat Perjanjian Kerja No.: 104/PT37.H9/N.2.2/1992
Tanggal 1 Juli 1992

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
1993

LAPORAN PENELITIAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD PADA DESA - DESA DI KECAMATAN LUBUK ALUNG DATI II PADANG PARIAMAN

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL 2-3-94
SUMBER/HARGA HD
KOLEKSI KKI
NO. INVENTARIS 104/140/94-p.1(2)
CALL NO 352.007 23 Toh p

Personalia Peneliti

Ketua : Drs. Didin Tohidin
Anggota : 1. Drs. Apri Agus
2. Drs. Chalid Marzuki, M.A.

ABSTRAK

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah merupakan Lembaga Masyarakat yang secara organisasi berdiri sendiri dan berkedudukan di desa. LKMD mempunyai tujuan dalam kegiatan programnya yaitu membantu pemerintahan desa/kelurahan di bidang pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut, menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun masalahnya sekarang adalah, seberapa jauh pengurus LKMD pada desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung mampu melaksanakan kegiatan program LKMD sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian maka penelitian ini dirancang berdasarkan metode expost fakto. Populasi penelitian adalah pengurus LKMD di Kecamatan Lubuk Alung yang berjumlah 285 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus SE dari Filad Amsyari dengan maksud agar sampel representatif maka didapat sampel sebanyak 164 orang sebagai responden dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Teknik pengumpulan data digunakan; wawancara, penyebaran angket dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian, telah menemukan antara lain : Bidang agama terlaksana sebanyak 32% pada penyuluhan masyarakat terhadap Undang-undang Perkawinan, 31% pada pembangunan sarana keagamaan, 27% pada pendidikan mental masyarakat. Bidang pendidikan dan P4 terlaksana sebanyak 16% pada pelaksanaan penyuluhan P4, 14% pada pembentukan kelompok simulasi P4, 13% latihan keterampilan. Bidang K3 terlaksana sebanyak 19% pelaksanaan ronda malam, 9% pembuatan Pos ronda, 6% memberikan bantuan hukum pada masyarakat, 5% latihan HANSIP/WANRA. Bidang penerangan terlaksana sebanyak 55% penyuluhan politik Pancasila, 16% pembentukan kelompencapir, 14% asah terampil antar desa. Bidang perekonomian terlaksana sebanyak 44% pada tanaman produksi pangan, 25% peternakan, 24% penyuluhan tentang KUD, 19% pembinaan P3A, 8% kerja sama KUD

dengan ekonomi masyarakat desa. Bidang kesehatan kependudukan dan KB terlaksana sebanyak 53% penyuluhan penting KB di masyarakat, 27% penyuluhan penting MCK bagi kesehatan, 20% pembinaan POSYANDU. Bidang Pemuda olah raga dan kesenian terlaksana sebanyak 27% pembinaan kenakalan remaja, 20% pada pembentukan club-club olah raga dan kesenian, 13% pada pelaksanaan pertandingan olah raga antar desa. Bidang kesejahteraan sosial terlaksana sebanyak 7% pada penyantunan anak terlantar/jompo, 4% membantu modal masyarakat ekonomi lemah, 3% membantu PSM. Bidang PKK terlaksana sebanyak 46% pada lomba K3, 24% pada perencanaan 10 program PKK, 18% pelaksanaan cerdas tangkas KB, 9% pelaksanaan lomba P2WKSS. Bidang pembangunan sarana dan lingkungan hidup terlaksana sebanyak 29% pada pelaksanaan keindahan lingkungan, 24% pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, 13% pemugaran rumah sehat.

Hambatan pelaksanaan kegiatan program LKMD disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan pengurus terhadap arti, fungsi dan tujuan LKMD di pedesaan. Sedang usaha pemecahan hambatan dilakukan dengan jalan; mengundang kembali pengurus LKMD dan mengundang pemuka-pemuka masyarakat/Kepala kaum/suku untuk merealisasikan peranan masyarakat dalam pembangunan desa. Pembinaan/pengawasan dari pembina LKMD tingkat kecamatan sangat kurang, tetapi persepsi pengurus LKMD terhadap hasil pelaksanaan kegiatan program LKMD dapat dikatakan cukup baik.

PENGANTAR

Penelitian merupakan salah satu karya ilmiah di perguruan tinggi. Karya ilmiah ini harus dilaksanakan oleh dosen IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu, baik sebagai dosen maupun sebagai peneliti.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen/peneliti untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademiknya. Dengan demikian mutu dosen/peneliti dan hasil penelitiannya dapat ditingkatkan.

Akhirnya saya merasa gembira bahwa penelitian ini telah dapat diselesaikan oleh peneliti dengan melalui proses pemeriksaan dari Tim Penilai Usul dan Laporan Penelitian Puslit IKIP Padang.

Padang, Januari 1993
Kepala Pusat Penelitian
IKIP Padang,

Dr. Zainil, M.A.
NIP 130187088

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah . 4
C. Penjelasan Istilah 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Asumsi 7
F. Kegunaan Hasil Penelitian 7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN 8
A. Kerangka Teoritis 8
B. Kerangka Konseptual 18
C. Pertanyaan Penelitian 21
BAB III METODOLOGI 23
A. Rancangan Penelitian 23
B. Populasi dan Sampel 23
C. Jenis dan Sumber Data 25
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data 27
E. Teknik Analisis Data 29
F. Prosedur Penelitian 29
G.Keterbatasan 30
BAB IV ANALISIS DAN APEMBAHASAN 32
A. Analisis 32
B. Jawaban Penelitian 53
C. Pembahasan 57
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 63
A. Kesimpulan 63
B. Rekomendasi 64
DAFTAR KEPUSTAKAAN 66
LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
1.	PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD OLEH PENGURUS LKMD PADA DESA-DESA DI KECAMATAN LUBUK ALUNG.	34
2.	HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD OLEH PENGURUS LKMD.	46
3.	USAHA PEMECAHAN HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD.	49
4.	PERSEPSI PENGURUS LKMD TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD.	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1 Instrumen Pelaksanaan Penelitian

2. Surat Kepala Pusat Penelitian IKIP Padang tentang Izin Pengumpulan Data.

3 Surat Keterangan/Rekomendasi Kepala Direktorat Sospol Tk. I Provinsi Sumatera Barat

4 Surat Keterangan/Rekomendasi Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna meningkatkan kualitas tarap kesejahteraan hidup rakyat Indonesia, pemerintah telah mengembangkan dan memfungsikan segenap Departemen untuk menjalankan fungsi programnya sesuai dengan tujuan dan sasaran departemen masing-masing. Tujuan dan sasaran pada setiap Departemen pada dasarnya adalah mempercepat tercapainya kualitas kemakmuran rakyat dan keadilan yang sepenuh-penuhnya berdasarkan UUD 1945. Dalam menuju sasaran dimaksud di atas, pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang potensial "cerdas, terampil, mampu berdiri sendiri serta mampu secara bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa" (GBHN TAP MPR No.II/MPR/1983:90).

Bertolak pada tujuan di atas, maka Departemen Dalam Negeri telah mengembangkan pola barunya dengan menyempurnakan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Kelurahan di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di Desa/Kelurahan.

Lembaga Ketahanan Masyaraktat Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

" a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
b. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan pengamalan Pancasila.
c. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.
d. Sebagai sarana Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.
e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
g. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
h. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat.
i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah Desa/Kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap (Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa 1988: 346-347).

Berpijak pada landasan tugas dan fungsi LKMD di seluruh pelosok tanah air, tentunya kita sebagai warga masyarakat kota maupun Desa sudah mengetahui arti dan fungsi LKMD yang bertujuan mensejahterakan masyarakat secara makmur dan penuh dengan keadilan, namun masalahnya sekarang adalah "seberapa jauh pengurus LKMD pada desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung mampu melaksanakan kegiatan program LKMD yang telah ditetapkan.

Hal di atas telah banyak mengundang dugaan dari kalangan masyarakat desa terhadap para pengurus dalam melaksanakan kegiatan program LKMD. Berdasarkan observasi dan wawancara dari beberapa orang tokoh masyarakat mengatakan; kurangnya kemampuan pengurus dalam melaksanakan tugasnya (Datuk Piliang 18 Mei 1992).

Selanjutnya informasi lain didapat bahwa kegiatan pelaksanaan program LKMD kurang berjalan dengan semestinya, hal ini disebabkan oleh banyak faktor di antaranya; kurangnya kerja sama antar seksi yang ada di LKMD, kurangnya bimbingan dan pengawasan dari pembina LKMD Kecamatan, kurangnya dukungan dari anggota masyarakat, kurangnya pengetahuan pengurus terhadap

keefektifan arti dan fungsi LKMD di pedesaan, kurangnya dana, kurangnya fasilitas yang dibutuhkan (Dalimi Ketua I LKMD Desa Sikabu).

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, kemungkinan-kemungkinan hambatan apa yang ditemui oleh para pengurus LKMD dalam melaksanakan kegiatan programnya.

Berdasarkan kepada faktor permasalahan yang didapat di lapangan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan program LKMD pada desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Tingkat II Padang Pariaman dengan judul "PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD PADA DESA-DESA DI KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN DATI II PADANG PARIAMAN".

Mengapa penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Lubuk Alung, alasannya penulis mengambil lokasi tersebut adalah sebagai berikut : (1) Kecamatan Lubuk Alung merupakan salah satu kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Dati II Padang Pariaman merupakan kecamatan yang dapat diperhitungkan dari tingkat kemajuan pembangunannya seperti; pembangunan PLTA Lubuk Cimatung, pembangunan irigasi pengairan yang dapat mengairi sawah 135.000 hektar di lima Kecamatan Dati II Padang Pariaman, pembangunan lapangan terbang internasional Ketaping. (2) Camat Lubuk Alung tahun 1990 telah meraih Camat Teladan tingkat Sumatera Barat. (3) Kecamatan Lubuk Alung merupakan salah satu pusat lalulintas dari berbagai propinsi. (4) Masyarakat Lubuk Alung adalah merupakan masyarakat yang inovasi dan dinamis serta mampu menerima pembaharuan dalam segala aspek kehidupan baik budaya maupun industri yang berskala internasional

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
PADANG

sekalipun, (5) Masyarakat Lubuk Alung bertekad untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional. Itulah sebagai alasan penulis dalam memilih Kecamatan Lubuk Alung sebagai lokasi penelitian.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi data yang mendekati kenyataan terhadap sebab-sebab timbulnya masalah tersebut, dan diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan landasan bagi pengambil keputusan oleh yang berwenang khususnya pembina LKMD Tingkat II dan Tingkat I Sumatera Barat.

B. Ruang Lingkup Dan Pembatasan Masalah.

1. Ruang Lingkup

Masalah sentral dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan program LKMD. Oleh pengurus LKMD pada Desa-Desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Alung yang meliputi kegiatan bidang agama, pendidikan dan P4, keamanan ketenteraman dan ketertiban, penerangan, perekonomian, pembangunan sarana dan lingkungan hidup, PKK, pemuda, olah raga dan kesenian, kesejahteraan sosial.

Dengan demikian cukup banyak variabel-variabel yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD diantaranya :

a. Latar belakang pendidikan pengurus lKMD.
b. Jenis-jenis kegiatan bidang program yang dilaksanakan.
c. Hambatan pelaksanaan program.
d. Usaha pemecahan hambatan.
e. Perencanaan kegiatan program tahunan.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

f. Pembinaan, bimbingan dan pembina LKMD kecamatan.

g. Pembinaan dari KUPDK

h. Temu karya LKMD tingkat Kecamatan.

i. Partisipasi masyarakat.

j. Keadaan fasilitas/sarana.

k. Sumber dana yang diperoleh LKMD.

l. Kerja sama antar unsur terkait.

2. Pembatasan Masalah.

Memperhatikan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD pada Desa-Desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Alung cukup banyak dan dikarenakan oleh terbatasnya dana, tenaga dan waktu yang tersedia, maka penelitian ini hanya bisa dilakukan pada variabel yang berpengaruh saja antara lain :

a. Latar belakang pendidikan pengurus LKMD.

b. Jenis-jenis kegiatan program LKMD (pelaksanaan).

c. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan program.

d. Usaha pemecahan hambatan.

e. Pembinaan, bimbingan dari pembina LKMD Kecamatan dan KUPDK

C. Penjelasan Istilah.

Guna menghindarkan interprestasi yang berbeda terhadap istilah yang dikemukakan, maka perlu diberikan penjelasan, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan ; yaitu kegiatan atau perbuatan baik berupa kognitif, psikomatrik dan apektif untuk menjalankan program LKMD yang telah ditetapkan.

2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ; ialah lembaga masyarakat

di Desa/Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegioatan pemerintah dan prakarsa serta gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan Nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan (Dep.Dalam Negeri Ditjen Pembangunan Desa 1989:1)

3. KUPD; adalah singkatan dari Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan
4. Pengurus LKMD yaitu Ketua umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi di LKMD (Buku Pedoman LKMD 1989: 7).

D. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini didasarkan pada tujuan sebagai berikut :

1 Guna mengungkapkan seberapa jauh kegiatan program LKMD pada Desa-Desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Alung dapat dilaksanakan oleh pengurus LKMD.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan program.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh pemecahan setiap kendala dapat dilakukan.
4. Untuk melihat seberapa jauh pembinaan, bimbingan dari pembina LKMD Kecamatan dan KUPDK kecamatan dalam pembinaan pengurus LKMD di Desa-Desa.
5. Untuk mengetahui seberapa jauh persepsi pengurus LKMD terhadap pelaksanaan kegiatan program yang selama ini dilaksanakan.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
I P PADANG

E. Asumsi.

Pelaksanaan kegiatan program LKMD ini didasarkan pada asumsi sebagai berikut :

Pengurus LKMD pada dasarnya telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan, mampu melaksanakan program, mampu bekerja sama mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, pengurus LKMD selalu mendapat bimbingan dari pembina LKMD kecamatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya stabilitas nasional.

F. Kegunaan Hasil Penelitian.

Berpedoman pada tujuan penelitian dan memperhatikan pertanyaan penelitian, maka hasil penelitian berguna :

1. Bagi Pusat Pengabdian Pada Masyarakat IKIP Padang sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menambah wawasan pengetahuan kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan KKN.
2. Bagi pembinaan LKMD Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Sumatera Barat umumnya, dalam mempertimbangkan fungsi dan peranan LKMD pada desa-desa di masa yang akan datang.
3. Bagi KUPDK dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya.
4. Bagi penulis untuk menambah wawasan cakrawala ilmu pengetahuan dalam membina mata kuliah kepemudaan pada Jurusan Pendidikan Kesehatan FPOK-IKIP Padang.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Kepustakaan

Bagi semua pimpinan organisasi lembaga departemen, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun swasta pada hakekatnya mereka dituntut untuk lebih dulu memiliki pengetahuan, keterampilan, pemahaman, mampu mengaplikasikan, mampu menganalisis dan mampu mengevaluasi organisasi yang dipimpinnya. Hal itu dimaksudkan agar semua pengurus bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Pengertian LKMD, "ialah lembaga masyarakat di Desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dalam pembangunan yang memadukan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan" (Ditjen Bangdes 1989:1).

LKMD berdiri didasarkan atas penyempurnaan dan peningkatan fungsi LSD menjadi LKMD (Kepres RI No.28 1980), selanjutnya tujuan LKMD adalah membantu pemerintah Desa/Kelurahan di bidang pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut, dan menumbuhkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kedudukan LKMD; adalah merupakan Lembaga Masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri dan berkedudukan di Desa/Kelurahan "(Ditjen Bangdes 1989:2).

Berdasarkan kepada peningkatan fungsi LKMD, seorang ahli pendidikan berpendapat: "bahwa di dalam pekerjaan profesional

dipergunakan teknik serta prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari secara sengaja yang kemudian secara langsung dipergunakan demi kemaslahatan orang lain "(T.Raka Joni 1980:9). Kemudian dikemukakan bahwa untuk mempraktekkan semua prosedur dan teknik maka setiap individu haruslah melalui pendidikan/latihan "memiliki keterampilan cognitif yang dapat dipertanggung jawabkan" (Tjipto Altomo. 1985:109).

Pada tahun 1972 pemerintah telah mengembangkan pola untuk mencapai Desa Swasembada, untuk mencapai Desa swasembada diterapkanlah sistem Tepalogi dan Klasipikasi perkembangan desa, "dengan sistim tersebut Desa/Kelurahan yang berciri sama dapat diamati mengenai tingkat perkembangan dan kepentingannya (BP Ditjen Bangdes 1973). Selanjutnya dikataknan "guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, pemerintah melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dan bentuk bimbingan, pengayoman dan pemberinan dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri" (Undang-Undang No.8 1975).

Untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan di pedesaan, maka diintruksikan tentang mekanisme pengendalian pelaksanaan program masuk Desa dengan melaksanakan sistim perencanaan dari bawah (bottom-up-planing) dan menyusun/mengajukan rencana/usulan proyek pembangunan Desa baik dalam rangka APBD maupun APBN dengan mekanisme kerja sebagai berikut :

"a. Rencana/usulan proyek dalam pembangunan tingkat Desa/Kelurahan disusun oleh LKMD dengan bimbingan dari Camat dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa

Kecamatan (KUPDK). Rencana/usulan proyek tersebut disiapkan dan diolah dari bahan-bahan usul perencanaan yang diajukan LKMD yang bersangkutan, diajukan oleh Kepala Desa/Kelurahan kepada Camat.

b. Semua rencana/usulan proyek dari Desa/Kelurahan yang telah diterima oleh Camat, kemudian dibahas bersama-sama dengan instansi-instansi yang ada di tingkat kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan (UDKP) dan atau temu karya LKMD tingkat kecamatan dan dapat dilengkapi pembahasannya dalam forum koordinasi lainnya dengan Ketua Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Tingkat II dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya. Selanjutnya di tingkat Desa setelah menerima daftar perincian anggaran sektoral yang masuk ke Desa/Kelurahan, Kepala Desa mengadakan rapat LKMD dengan LMD, guna mengambil langkah-langkah di dalam pelaksanaan dengan bimbingan dan petunjuk dan petunjuk dari Camat/KUPDK. Dalam pelaksanaan program/proyek-proyek di tingkat Desa LKMD berperan sebagai penggerak dan pelaksanaan sesuai fungsi LKMD bersangkutan "(Amir Mahmud 1983).

Para ahli teori organisasi berpendapat tentang keefektifan suatu prestasi organisasi diukur berdasarkan tujuannya. Efektivitas ditentukan dengan derajat sampai dimana organisasi itu dapat mewujudkan tujuannya. Efisiensi diukur berdasarkan jumlah masukan yang dipergunakan untuk mewujudkan suatu hasil yang biasanya berhubungan dengan tujuan. Efektivitas organisasi dirumuskan sebagai "the maximazation of return to the organization, by economic tehnical means (efisiency) and by political means" (Katz dan Khan 1971), menurut mereka sistem efisiency adalah ratio antara hasil (output) dan masukan (input). Selanjutnya ahli lain mengatakan "sependapat bahwa efektifitas dan efisiensi organisasi pada dasarnya diukur menurut pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ", ia menganggap model ini cukup obyektif dan percaya karena dengan model ini, peneliti atau penilai akan terhindar dari nilai-nilai subyektif (Etzomi 1971), dan "model ini dapat dipergunakan tidak hanya untuk

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
PADANG

organisasi komersial, tetapi dapat digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas organisasi sosial (Katz dan Khan). Selanjutnya dikatakan kelemahan model ini "adalah penemuan studi hampir selalu sama nadanya sebagai akibat dari asumsi yang terdapat dalam model itu. Kesimpulannya bahwa organisasi yang dinilai tidak dapat mencapai tujuan secara efektif "(Etzomi 1973:47).

Seorang ahli memperkenalkan suatu study empiris modelnya dirumuskan dari tujuan yang hendak dicapai organisasi. "langkah pertama merumuskan jenis organisasi dalam pengertian tujuan umum organisasi itu. Organisasi dipandang sebagai suatu sistim yang mempunyai input dan output. Output dirumuskan sebagai hasil kegiatan seluruh sistim dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Input dan variabel sistim dirumuskan dan ukuran dibuat untuk menunjukkan variabel itu "(Charles Rece 1971:89-100).

Tujuan penelitiannya adalah untuk menemukan bagaimana organisasi sosial dapat diukur keberhasilannya walaupun organisasi sosial itu tidak senyata organisasi industri dan ia ingin menemukan bagaimana organisasi yang demikian membuat kebijaksanaan, kemudahan dan tenaga. Model penelitian ini menggunakan pendekatan studi organisasi sosial, khususnya dimana organisasi itu diinginkan efektivitas fungsi organisasi dan kemudian menentukan aspek-aspek kegiatannya, Rice percaya model ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mempelajari dan menilai efektivitas berbagai organisasi sosial.

LKMD, adalah merupakan suatu organisasi kemasyarakatan, maka dari itu Teori organisasi modern memandang organisasi

sebagai suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan. Penganut teori ini menilai efektivitas organisasi berdasarkan kriteria sistem yang diangkat dari konsep "Kebutuhan" organisasi sebagai suatu sistem sosial yang hidup. Hal ini katanya, "merupakan persyaratan yang harus dipenuhi organisasi untuk dapat hidup dan beroperasi secara efektif dalam situasi tertentu".(Ghorpode-1971:8). Selanjutnya seorang ahli Teori organisasi modern merumuskan keefektipan organisasi sosial, yaitu; "(a) jangka pendek, (b) jangka menengah, (c) jangka panjang" (Gibson dkk).

Dari pendapat Gibson dkk di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang termasuk kedalam jangka pendek adalah; produksi, efisiensi dan kepuasan. Yang termasuk kedalam program jangka menengah adalah: kemampuan mengadaptasi, dan kemampuan berkembang. Yang termasuk kedalam jangka panjang adalah: kemampuan untuk bertahan hidup. Yang dimaksud dengan produksi ialah kemampuan organisasi (LKMD) menghasilkan mutu dan output yang diharapkan oleh lingkungan dalam pelaksanaan kegiatannya. Ukuran untuk produksi dalam hal ini termasuk untung rugi, orang yang dilayani dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan efisiensi adalah rasio output dan input. Selanjutnya yang dimaksud dengan kepuasan adalah seberapa jauh organisasi (LKMD) dapat memuaskan kebutuhan anggota-anggota, hal ini diukur melalui data sikap masyarakat. Kemudian kemampuan mengadaptasi dimaksudkan ialah sejauh mana organisasi (LKMD) itu mampu mengadaptasi perubahan yang diakibatkan dari dalam atau dari luar. Kemampuan LKMD ini untuk mengadakan adaptasi dapat dilihat

ketika situasi dan waktu menuntut untuk beradaptasi.

Kemudian salah seorang ahli mengatakan tentang kriteria efektivitas, yaitu, " (1) Kemampuan organisasi memberi keuntungan, (2) Derajat sejauh mana organisasi dapat memuaskan anggota-anggotanya dan (3) Derajat sejauh mana organisasi mempunyai nilai terhadap masyarakat luas "(Frank Friendlander dan Hal Pickle 1971).

Guna melaksanakan kegiatan program LKMD yang telah ditetapkan dan untuk mencapai efektivitas tujuan LKMD semaximal mungkin, maka peranan perencanaan sangat penting. Perencanaan dimaksud mencakup penguraian dan penegasan komponen masukan (input) ke dalam tubuh organisasi LKMD, tujuan yang hendak dicapai (output) serta cara mencapai tujuan (proses). Tujuan hendaknya dirumuskan jelas dan tegas dapat diukur secara pasti, realitas dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan yang tidak bisa dielakkan lagi.

Seorang ahli administrasi negara mengatakan, "perencanaan sebagai pengambilan keputusan dalam hal ini sesungguhnya merencanakan berarti melakukan usaha secara sadar dan sistematik untuk mengatasi sesuatu keadaan yang apabila tidak diatasi akan dapat menimbulkan masalah bagi organisasi, selanjutnya ia memberikan 3 jenis keputusan yang diambil dalam satu organisasi; (1) keputusan strategik, (2) keputusan teknis, (3) keputusan operasional "(Sondang P.Siagian).

Pendapat di atas sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting untuk dapat diaplikasikan oleh para pengurus LKMD dalam membuat rencana jumlah proyek pembangunan Desa. Hal ini akan

terlaksana bila setiap pengurus memiliki kemampuan dasar dalam merencanakan. Ada 7 (tujuh) langkah yang harus dipergunakan oleh setiap pengurus LKMD dalam merencanakan Kegiatan program dan melaksanakan program yaitu, " (1) mendefinisikan hakekat permasalahnan, (2) mengumpulkan data analisisnya, (3) identifikasi dan penentuan berbagai alternatif, (4) analisis berbagai alternatif, (5) pemilihan salah satu alternatif, (6) pelaksanaan alternatif terpilih, (7) penilaian hasil yang dicapai" (Sondang P.Siagian).

Untuk mencapai pelaksanaan dari setiap bidang kegiatan program LKMD di Desa-desa, kiranya sangat penting dan sangat mendasar terhadap pelaksanaan ketepatan suatu keputusan diuji. Artinya, mungkin saja proses pengambilan keputusan berlangsung dengan mulus sehingga diperoleh suatu rencana yang di atas kertas nampak meyakinkan. Disamping pentingnya memberikan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan program LKMD dan tuntutan suatu tujuan LKMD untuk dilaksanakan dengan efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang tinggi. Artinya, keputusan yang diambil dalam hal merencanakan/usulan proyek dan pelaksanaannya harus pula mendorong pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga dan waktu sedemikian rupa. Sehingga diperoleh hasil suatu pelaksanaan kegiatan program LKMD secara optimal. Secara sederhana gambaran konsep tersebut dapat dilihat bagan di bawah ini.

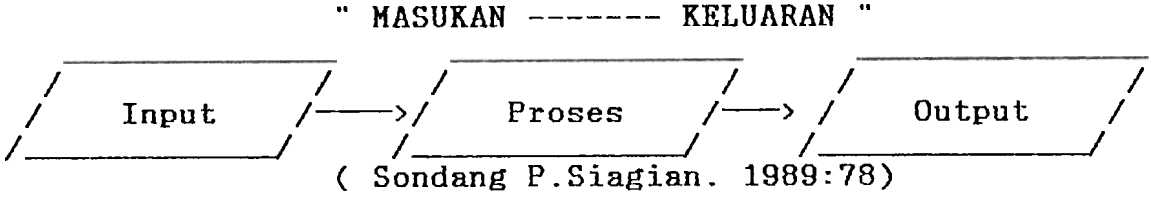

(Sondang P.Siagian. 1989:78)

Orientasi bagan di atas adalah merupakan model yang sangat relevan sebagai dasar perencana program, usulan proyek, dan pelaksanaan kegiatan program LKMD. Oleh pengurus LKMD di Desa-Desa. Artinya input yang dimiliki oleh LKMD digunakan sedikit mungkin untuk menghasilkan suatu output pelaksanaan kegiatan tertentu. Bekerja dengan efisien berarti berusaha untuk tidak melaksanakan semua input yang tersedia. Namun pada waktu yang bersamaan orientasi efektivitas pelaksanaan kegiatan program LKMD perlu ditumbuh dan dikembangkan. Orientasi efektivitas pelaksanaan kegiatan program LKMD diperlukan pemanfaatan input tertentu yang masuk ke tubuh organisasi LKMD.

Untuk melihat suatu hasil pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD di Desa ada tiga jenis temuan yang dapat dilihat, " (1) hasil yang dicapai sesuai dengan rencana, dalam hal ini yang diukur adalah alokasi dana, pemanfaatan tenaga kerja, penggunaan sarana dan prasarana serta waktu, (2) terdapat kesenjangan antara berbagai ketepatan dalam rencana dengan hasil yang dicapai, (3) sarana melampaui apa yang telah ditetapkan dalam rencana "(Sondang P.Siagian. 1989:80).

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan program LKMD di Desa-desa, diperlukan sekali pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari yang berwenang. Pengawasan disini mutlak harus dilakukan agar pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Ada dua jenis pengawasan dalam lingkungan pemerintah :

1. Pengawasan melekat.

Dalam pengawasan melekat dengan hakikatnya, ciri-cirinya dan berbagai instrumennya serta berlaku bagi semua organisasi di

dalam dan di luar lingkungan pemerintah. Salah satu yang ditonjolkan dalam pembahasan tersebut ialah bahwa efektivitas manajerial seseorang yang menduduki jabatan pimpinan, tanpa mempersoalkan tingkatan dalam jajaran kepemimpinan itu, sangat tergantung pada kemampuannya melakukan pengawasan melekat disamping kemampuannya menyelenggarakan berbagai fungsi organik manajerial lainnya. Setiap pejabat atau pimpinan, disamping sebagai perencana yang cekatan, juga disamping organisator yang handal, dan disamping penggerak yang tangguh, setiap manajerial harus pula menjadi pengawas yang efektif.

2. Pengawasan fungsional.

Pengawasan fungsional biasa dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu, tetapi dapat pula dilakukan pengawasan oleh aparat pengawasan yang berada di luar instansi meskipun masih dalam lingkungan pemerintah.

Yang menjadi sasaran dari seluruh kegiatan pengawasan fungsional adalah segala sesuatu yang tertuang dalam rencana masing-masing instansi yaitu :

"a. Apakah kebijaksanaan yang telah ditetapkan dijalankan oleh jajaran pelaksana atau tidak.
b. Penggunaan dana, baik yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin maupun tugas-tugas pembangunan, untuk melihat apakah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja mulai dari pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, penyusunan dan pengapusan .
d. Ketaatan aparatur pelaksana pada prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan.
e. Managemen sumber daya manusia, mulai dari rekruitmen penempatan, pembinaan, promosi, pembinaan karir, pemberian hak pegawai dan pensiunan" (Sondang P.Siagian).

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

104/HD/94-p1(2)

352.00723
Foh
p1

3. Pengawasan sosial.

Dalam satu masyarakat yang menganut paham demokrasi, partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan bukan saja dibenarkan, tetapi justru didorong. Salah satu bentuk ialah dengan turut serta mengamati pelaksanaan kegiatan tugas-tugas umum pemerintahan seperti dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan pembangunan dalam segala segi kehidupan negara dan bangsa.

Pada dasarnya pengawasan akan terlaksana dan kunci keberhasilannya terletak pada "rasa tanggung jawab" yang besar dan semua pihak terikat pada tanggung jawab tersebut yang menyangkut kehidupan bersama dalam tatanan negara bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan program LKMD Kepala Negara menekankan "agar Pemerintah Daerah memberi arah dan peluang supaya kegiatan pelaksanaan LKMD sebagai penunjang program Pemerintah, sedangkan rencana dan pelaksanaannya agar benar-benar merupakan prakarsa dan swadaya masyarakat". Kepada semua Departemen dan aparatur pemerintah umumnya, Kepala Negara meminta; "agar memberikan dorongan bagi setiap kegiatan LKMD dalam menciptakan suasana segar bagi berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat" (Soeharto. 1989). Selanjutnya Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman mengatakan:

> "masalah Desa berpenduduk jarang serta sempitnya lahan kerja di Pedesaan, merupakan dua hal pokok yang perlu dibenahi dalam upaya memacu pembangunan dan salah satu alternatif menjawab tantangan itu dengan meningkatkan swadaya masyarakat dan kemandirian berproduksi serta memasarkan sendiri hasil produksinya" (Bakri Bahar. Sekda Padang Pariaman 1988)".

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Berpijak pada anjuran Kepala Negara di atas, seyogianya kegiatan program LKMD tidak tergantung selama bulan bakti LKMD saja, tetapi terus merupakan kegiatan rutin yang diprakarsai oleh masyarakat Desa sendiri. Menyadari semua itu, diharapkan seluruh jajaran pengurus, seksi-seksi LKMD hendaknya mampu melaksanakan kegiatan program secara terpadu. Sebab sekap aktif yang ditonjolkan LKMD merupakan tindak lanjut dari rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kondiisi dinamis masyarakat memang tidak mudah, dan akan dapat terlaksana semua kegiatan program LKMD apabila Dinas dan Instansi yang terkait dalam 10 seksi LKMD tersebut dapat melakukan pembinaan secara terarah. Pembinaan dimaksudkan untuk menonjolkan peran serta seksi-seksi LKMD dalam melaksanakan pembangunan, dengan demikian masyarakat dapat pula merasakan keberadaan LKMD sebagai lembaga aspiratif masyarakat di pedesaan.

Berpijak pada beberapa pendapat para ahli tentang bagaimana suatu organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mampu melaksanakan tugas kegiatan programnya dan berdasarkan pada pendapat lain yang berkenaan dengan keefektifan suatu organisasi sosial dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi sosial, maka disini penulis ingin mencoba mengadakan penelitian terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan judul "Pelaksanaan Kegiatan Program LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung Dati II Padang Pariaman.

B. Kerangka Konseptual

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa

pelaksanaan kegiatan program LKMD adalah merupakan kegiatan pengurus LKMD untuk menjalankan fungsinya.

Keberhasilan para pengurus LKMD dalam melakukan kegiatan pertama-tama harus memiliki pengetahuan keterampilan dan mampu melakukan hubungan dengan tugas pokok LKMD :

1. Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah.
2. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahnan di Desa/Kelurahan.

Di sisi lain pendidikan/latihan bagi setiap pengurus perlu diberikan agar mereka memahami efisiensi dan keefektifan lembaga LKMD, yang berkedudukan di Desa.

Program kegiatan LKMD meliputi sepuluh bidang kegiatan antara lain: (1) bidang agama, (2) bidang pendidikan dan P4, (3) bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban, (4) bidang penerangan, (5) bidang kesehatan kependudukan dan KB, (6) bidang pembangunan prasarana dan lingkungan hidup, (7) bidang PKK, (8) bidang pemuda, olah raga dan kesenian, (9) bidang perekonomian dan (10) bidang kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan kegiatan program akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: latar belakang pendidikan, jenis-jenis kegiatan program, perencanaan kegiatan program, pelaksanaan program, hambatan terhadap pelaksanaan program, usaha pemecahan hambatan, hubungan kerja antar instansi, pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari pembina LKMD Kecamatan, sumber dana, partisipasi masyarkat dan keadaan fasilitas yang tersedia.

Pelaksanaan kegiatan program LKMD akan berjalan dengan baik apabila setiap program mampu membuat perencanaan sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) mampu mendefinisikan hakekat permasalahan, (2) mampu mengumpulkan data dan analisinya, (3) mampu mengidentifikasikan dan penentuan alternatif, (4) mampu menganalisis berbagai alternatif, (5) mampu memilih salah satu alternatif, (6) mampu melaksanakan alternatif terpilih dan (7) mampu memberikan penilaian terhadap hasil yang dicapai sesuai dengan variabel-variabel seperti dikemukakan di atas dan mempedomani tugas dan kegiatan program LKMD yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Tahun 1989, maka gambaran Skematis Kerangka Konseptual dalam penelitian adalah sebagai berikut :

KERANGKA KONSEPTUAL

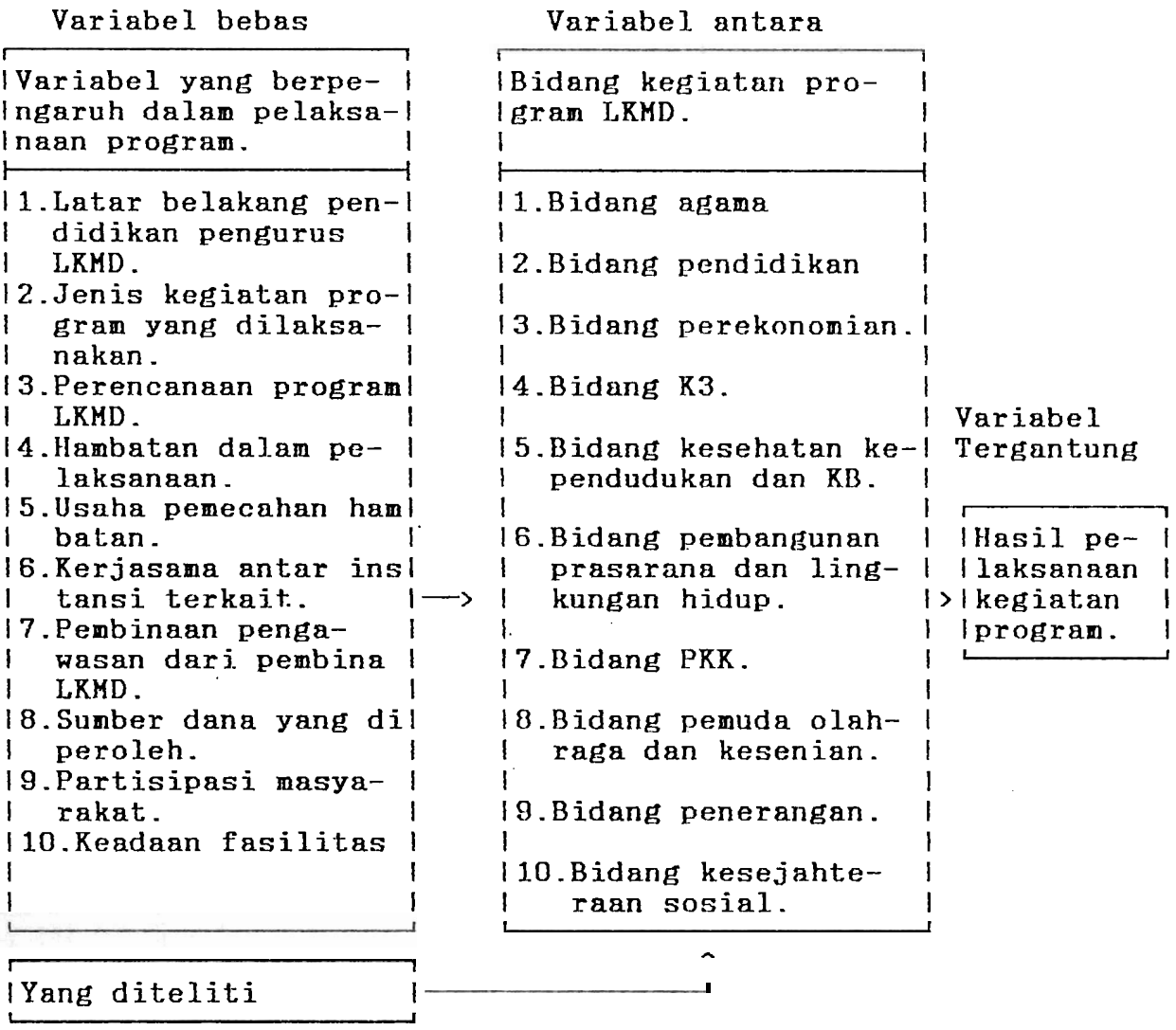

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kepada permasalahan penelitian yang dikemukakan dan berdasarkan kerangka teori serta tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka dapatlah dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa jauh pengurus LKMD pada desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung dapat melaksanakan kegiatan program LKMD yang telah ditetapkan?

2. Seberapa jauh hambatan yang ditemui oleh pengurus LKMD dalam setiap pelaksanaan kegiatan program.
3. Seberapa jauh usaha pemecahan hambatan yang dapat dilakukan oleh pengurus LKMD.
4. Seberapa jauh pembinaan/bimbingan dari Pembina LKMD kecamatan dan KUPDK dapat dilaksanakan.
5. Seberapa jauh persepsi pengurus terhadap pelaksanaan kegiatan program LKMD di desanya.

BAB III

METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Berdasarkan kepada penelitian yaitu, Pelaksanaan Kegiatan Program LKMD oleh Pengurus LKMD, maka penelitian ini pada dasarnya dirancang berdasarkan expost fakto. Artinya data yang dikumpulkan sesudah proses sesudah kejadian yang sudah dijelaskan dalam kegiatan teori maupun kerangka berfikir (Program Akta V, modul IB. 1992/1993. 14). Metode ini dipilih karena untuk mengadakan penelitian experimen jelas sulit. Seorang ahli berpendapat tentang batasan penelitian expost fakto, yaitu; "penyelidikan empiris secara sistematis dimana tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung, karena wujud variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi" (Arief Furchan. 1982:382). " Ditinjau dari teknik pengumpulan data pabila menggunakan kuesioner dan skala sikap maka penelitian ini dapat juga disebut survey" (Syofyan Effendi. 1985:8).

Dalam penelitian ini akan dilihat seberapa jauh dapat terlaksana kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD pada Desa-Desa di Kecamatan Lubuk Alung. Dan untuk melihat terlaksana atau tidaknya pelaksanaan kegiatan program LKMD tentu terlebih dulu meninjau jenis-jenis kegiatan program apa saja yang dilaksanakan oleh pengurus LKMD, kemudian menelusuri setiap penyebab tidak terlaksananya program LKMD dimaksud.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Berdasarkan pada data yang diterima dari Kantor Kecamatan

Lubuk Alung bahwa populasi pengurus LKMD sebanyak 285 orang, yang tersebar pada sembilan belas buah LKMD di Kecamatan Lubuk Alung. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus LKMD, yaitu; ketua umum LKMD, ketua I LKMD, ketua II LKMD, sekretaris LKMD, bendahara LKMD dan 10 orang ketua seksi di LKMD yang berjumlah 285 orang.

2. Sampel

Agar supaya sampel yang digunakan dalam penelitian representatif, maka untuk menentukan sampel digunakan rumus :

$$SE = \frac{P.Q}{N} \times \frac{Np - N}{Np - N}$$

P = proporsi dimana suatu keadaan bisa terjadi di dalam populasi, jadi Q = 1 - P

P = angka pelaksanaan

Np = besar populasi

N = besar sampel yang akan diambil

SE = standart Error yang menunjukkan derajat penyebarnan data di dalam sampling distribution of proportion dari suatu karakteristik yang diteliti.

$$SE = \frac{\text{deegree of reliability } 0,05}{\text{Zc (Comfidence level) } 1,96}$$

(Filad Amsyari. 191:23)

Jadi berdasarkan rumus SE dapat dicari banyaknya sampel sebagai berikut

$$\frac{0,05}{1,96} = \frac{0,5 \times 0,5}{N} \times \frac{285 - N}{284}$$

$$\frac{0,05}{1,96} = \frac{0,25}{N} \times \frac{285 - N}{284}$$

$$\frac{0,05}{1,96} = \frac{71,25 - 0,25\ N}{284\ N}$$

$$0,18481882484\ N = 71,25 - 0,25\ N$$

$$0,43481882484\ N + 0,25\ N = 71,25$$

$$N = \frac{71,25}{0,43481882484\ N + 0,25}$$

$$N = \frac{71,25}{0,4348188284}$$

$$N = 163,86$$

N = 164 (dibulatkan)

Jadi jumlah sampel adalah sebanyak 164 orang pengurus, teknik pengambilan sampel dengan teknik random sampling.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan angket yang diisi kepada responden, pada jenis data :

a. Bidang agama:

1). penyuluhan pembinaan mental masyarakat

2). penyuluhan pembinaan tentang perkawinan

3). prasarana dan sarana keagamaan

b. Bidang pendidikan dan P4

1). penyuluhan tentang P4

2). pembentukan kelompok simulasi P4

3). pendidikan dan latihan kursus keterampilan

c. Bidang K3

1). pelaksanaan keamanan lingkungan

2). pembuatan pos-pos ronda

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

3). latihan khusus HANSIP/WANRA

4). pelayanan hukum terhadap masyarakat

d. Bidang penerangan

1). penyuluhan politik pancasila

2). pembentukan kelompencapir

e. Bidang perekonomian dan koperasi

1). ekonomi

- melaksanakan P3A
- melaksanakan usaha produksi tanaman pangan
- melaksanakan usaha produksi peternakan

2). koperasi

- melaksanakan penyuluhan KMD
- melaksanakan hubungan usaha KUD dengan usaha ekonomi desa.

f. Kesehatan, kependudukan dan KB:

1). membantu POSYANDU

2). melaksanakan tempat MCK

3). pelaksanaan ceramah tentang KB

g. Seksi pemuda, olah raga dan kesenian

1). melaksanakan pembentukan club-club cabang olah raga dan

2). pembinaan terhadap kenakalan remaja.

3). melaksanakan pertandingan tiap cabang olah raga antar desa

h. Kesejahteraan sosial :

1). memberikan latihan keterampilan

2). memberikan bantuan modal

3). meningkatkan pengetahuan PSM

i. PKK :

1). melaksanakan perencanaan 10 pokok PKK

2). melaksanakan cerdas tangkas tentang KBS

j. Bidang pembangunan prasarana dan lingkungan hidup.

1). membangun jalan desa dan perbaikan

2). melaksanakan pembangunan sarana sosial

k. Hambatan pelaksanaan program.

l. Usaha pemecahan hambatan.

m. Pembinaan dari pembina LKMD kecamatan.

n. Sumber dana yang diperoleh.

o. Penggunaan dana.

p. Partisipasi masyarakat.

q. Latar belakang pendidikan

2. Sumber data

Sesuai dengan tujuan penelitian maka sumber data dimintakan dari seluruh pengurus LKMD; ketua umum LKMD, ketua I LKMD, ketua II LKMD, sekretaris LKMD, bendaharawan LKMD dan 10 orang ketua-ketua seksi di LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung.

D. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Berpedoman kepada jenis dan sumber data yang dikemukakan maka untuk mendapat data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dan alat pengumpul data, yaitu :

1. Interviu (wawancara).
2. Pengedaran angket (koesioner).
3. Studi dokumentasi.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah digunakan penelitian berupa angket. Angket ini dibuat dan

dikembangkan sendiri oleh peneliti yang didasarkan pada tugas program pengurus LKMD yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman LKMD 1989 dan dijabarkan menjadi item-item pertanyaan.

Angket yang telah disusun dan sebelum turun ke lapangan terlebih dulu dilakukan uji coba instrumen kepada salah satu pengurus LKMD yang tidak terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu pada pengurus LKMD di Desa Sikabu Kecamatan Lubuk Alung. Setelah dilakukan uji coba terhadap instrumen penelitian, maka hasil uji coba menunjukkan adanya ketidak seragaman jawaban pada penerimaan dana bangdes selama satu repelita dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 dan penggunaan uang bangdes sangat bervariasi. Tetapi pada pelaksanaan program LKMD menunjukkan adanya keseragaman jawaban dengan kata lain pelaksanaan kegiatan program LKMD dapat dikatakan cukup terlaksana. Langkah berikutnya adalah mengadakan revisi terhadap item-item pertanyaan yang kurang menuju pada sasaran yang diharapkan. Dan pada item pertanyaan yang menyangkut penerimaan dana bangdes serta pelaksanaannya selama satu repelita dihilangkan, guna menghindarkan kesalah pahaman. Maka langkah selanjutnya langsung menyebarkan angket ini kepada seluruh pengurus LKMD yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini disebarkan selama dua minggu, hal ini dilakukan oleh peneliti sendiri mendatangi setiap pengurus yang menjadi sampel. Setelah angket diisi oleh responden pengurus LKMD, maka langkah selanjutnya peneliti mengambil angket tersebut dengan mendatangi kembali para responden yang telah menjadi sampel penelitian tadi dan penarikan instrumen yang telah diisi oleh responden pengurus LKMD dilakukan selama dua minggu,

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

jadi mulai mengedarkan angket sampai mengumpulkan angket kembali memakan waktu kurang lebih satu bulan setengah.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan rumus teknis analisis deskriptif yaitu sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\ \%$$

Keterangan:

F = Frekuensi jawaban responden pada masing-masing pertanyaan.

P = Prosentase

N = Jumlah responden

Langkah pengolahan:

1. menghitung frekuensi (F)
2. menghitung prosentase (%)
3. menguraikan hasil analisis pengolahan data mengurutnya dan menyimpulkannya.

F. Prosedur Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini ditempuh langkah langkah sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan proyek penelitian ke pihak pemberi dana PUSLIT IKIP Padang.
2. Setelah disetujui oleh pihak pemberi dana melalui PUSLIT IKIP Padang, dan seterusnya penandatanganan kontrak dengan pihak pemberi dana dan langsung mempercayakan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.
3. Mengajukan izin penelitian ke Ditjen Sospol Tingkat I melalui

surat permohonan yang dibuat oleh PUSLIT-IKIP Padang.

4. Menyusun desain instrumen, mengadakan uji coba instrumen dan langkah berikut menyebarkan angket kepada seluruh responden pengurus LKMD yang dijadikan sampel dalam penelitian. Semua langkah ini dilakukan setelah Surat Izin ini dikeluarkan oleh Ditjen Sospol Tingkat I, Ditjen Sospol Tingkat II dan Tingkat Kecamatan dan seterus pengantar ke Desa-desa.
5. Penarikan Instrumen yang telah diisi oleh responden pengurus LKMD, mengolah data serta menginterpretasikan data guna menyusun bahan laporan.
6. Melaporkan drap pertama ke PUSLIT-IKIP Padang untuk dimonitoring dan didiskusikan oleh staf ahli di PUSLIT.
7. Penyusunan laporan akhir adalah hasil revisi staf ahli dari PUSLIT.
8. Langkah terakhir adalah memperbanyak laporan hasil penelitian dan disebarkan kepada yang berhak memperoleh hasil penelitian ini.

G. Keterbatasan

Penelitian "Pelaksanaan Kegiatan Program LKMD Pada Desa-Desa/Kelurahan Di Kecamatan Lubuk Alung" mempunyai keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut

1. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Disini peneliti tidak menggunakan analisis lain guna menguji pertanyaan yang diajukan, sehingga ada kemungkinan yang seharusnya dilaksanakan ternyata tidak dilaksanakan.
2. Jumlah sampel terbatas hanya kepada pengurus LKMD pada Desa-

desa di Kecamatan Lubuk Alung.

3. Hasil pelaksanaan program, tidak dilakukan langsung terhadap kegiatan nyata di mata masyarakat, tentang bagaimana pengurus LKMD melaksanakan tugasnya di lapangan.

Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dikemukakan di atas, hal ini disebabkan karena dana tidak mencukupi.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada penelitian, maka dalam bagian ini akan dikemukakan analisis dan pembahasan terhadap data dan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD. Data yang telah terkumpul di atas dan dianalisis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya data yang telah diolah dan diinterpretasikan akan dapat menguji pertanyaan yang telah ditetapkan pada bagian terdahulu. Dan hasil penelitian ini akan diuraikan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. Dengan demikian bagian ini merupakan bagian inti dari laporan ini, karena akan menggambarkan seberapa jauh pengurus LKMD mampu melaksanakan kegiatan programnya.

A. Analisis Deskriptif

Bertitik tolak dari permasalahan yang ingin diungkapkan sesuai dengan tujuan penelitian, maka analisis mencakup pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung.

1. Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan data dari 164 orang responden pengurus LKMD (ketua umum LKMD, ketua I LKMD, ketua II LKMD, sekretaris LKMD, bendahara LKMD, dan seksi-seksi di LKMD) ternyata memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda diantaranya, 9 orang responden pengurus LKMD atau 9% memiliki ijazah SD, 37 orang responden pengurus LKMD atau 23% memiliki ijazah SLTP, 97 orang responden pengurus LKMD atau 59% memiliki ijazah SLTA, 8 orang responden pengurus LKMD atau 5% memiliki ijazah sederajat Sarjana Muda dan 7 orang responden pengurus atau 4% memiliki ijazah Sarjana.

Berdasarkan data tentang latar belakang pendidikan pengurus LKMD, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 59% berlatar belakang pendidikan SLTA.

2. Masa Dinas

Dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan masa dinas mereka diantaranya, 9 orang responden pengurus LKMD atau 5% memiliki masa dinas 1 - 2 tahun, 3 orang responden pengurus LKMD atau 2% memiliki masa dinas 2 - 3 tahun, 68 orang responden pengurus LKMD atau 41% memiliki masa dinas 3 - 4 tahun dan 84 orang responden pengurus LKMD atau 52% memiliki masa dinas 5 tahun ke atas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengurus LKMD pada Desa-desa/Kelurahan di kecamatan Lubuk Alung telah memiliki masa dinas 5 tahun ke atas, dengan demikian dapat dikatakan sudah memiliki pengalaman yang cukup.

3. Keadaan Desa

Selanjutnya dari 164 orang responden pengurus LKMD mengatakan terhadap keadaan Desanya antara lain; 103 orang responden pengurus LKMD atau 63% Desa Swasembada, 39 orang responden LKMD atau 24% Desa Swakarya, dan 22 orang responden pengurus LKMD atau 13% Desa Swadaya.

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan desa di kecamatan Lubuk Alung sebanyak 63% berkatagori Desa Swasembada, dengan kata lain Desa-desa di kecamatan Lubuk Alung sudah memiliki kemampuan dalam membangun desanya sendiri dengan kekuatan sumber daya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

rakyatnya.

4. Pelaksanaan Kegiatan Program LKMD

Sebagaimana tujuan penelitian yaitu mengangkat seberapa jauh terlaksana kegiatan program LKMD, maka berikut ini akan diuraikan hasil analisa data sebagai berikut ;

TABEL I

PREKUENSI PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD OLEH PENGURUS LKMD PADA DESA DI KECAMATAN LUBUK ALUNG

	JENIS KEGIATAN PROGRAM LKMD	ADA		KADANG KADANG		TIDAK PERNAH		TOTAL	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Bidang Agama								
	a. Pelaksanaan pendidikan/pembinaan mental masyarakat.	45	27	75	46	44	27	164	100
	b. Pelaksanaan pembangunan masyarakat terhadap UU Perkawinan.	52	32	87	53	25	15	164	100
	c. Pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana keagamaan.	51	31	92	56	21	13	164	100
2.	Bidang Pendidikan dan P4								
	a. Pelaksanaan penyuluhnan P4	27	16	56	35	81	49	164	100
	b. Pelaksanaan pembentukan kelompok Simulasi P4.	23	14	79	48	62	38	164	100
	c. Pelaksanaan pendidikan/latihan kursus keterampilan masyarakat.	21	13	37	23	106	64	164	100
3.	Bidang K.3								
	a. Pelaksanaan ronda malam.	31	19	122	74	11	7	164	100
	b. Pelaksanaan pembuatan Pos-Pos ronda.	15	9	29	18	120	73	164	100
	c. Pelaksanaan latihan HANSIP/WANRA Desa.	8	5	15	9	141	86	164	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d. Bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan.	13	6	21	13	130	79	164	100
4.	Bidang Penerangan								
	a. Pelaksanaan penyuluhan Politik Pancasila pada masyarakat	91	55	45	27	28	18	164	100
	b. Pelaksanaan pembentukan kelompencapir.	27	16	72	44	65	40	164	100
	c. Pelaksanaan asah terampil kelompencapir antara desa	23	14	83	51	58	35	164	100
5.	Bidang Perekonomian dan koperasi								
	a. Pelaksanaan pembinaan P3A.	31	19	65	40	68	41	164	100
	b. Pelaksanaan usaha produksi tanaman pangan.	72	44	34	21	58	35	164	100
	c. Pelaksanaan usaha produksi peternakan dan perikanan.	41	25	59	36	64	39	164	100
	d. Pelaksanaan penyuluhan terhadap pentingnya KUD di Desa.	40	24	83	51	41	25	164	100
	e. Pelaksanaan usaha antara KUD dengan usaha ekonomi Desa.	13	8	28	17	123	75	164	100
6.	Bidang Kependudukan dan KB								
	a. Pembinaan Posyandu	33	20	79	48	52	32	164	100
	b. Penyuluhan penting MCK terhadap kesehatan masyarakat.	45	27	97	60	22	13	164	100
	c. Penyuluhan penting KB di masyarakat.	86	53	56	34	22	13	164	100
7.	Bidang Pemuda, Olah-raga dan Kesenian								
	a. Pelaksanaan pembentukan club-club cabang olah raga dan kesenian.	33	20	89	54	42	26	164	100
	b. Pembinaan terhadap kenakalan remaja.	47	27	103	64	14	9	164	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Pelaksanaan pertandingan cabang olah raga antar Desa.	22	13	86	52	56	35	164	100
8.	Bidang Kesejahteraan sosial								
	a. Pelaksanaan penyantunan anak terlantar dan jompo.	12	7	30	18	122	75	164	100
	b. Membantu modal usaha masyarakat ekonomi lemah.	7	4	15	9	142	87	164	100
	c. Membantu meningkatkan pengetahuan PSM	5	3	13	8	146	89	164	100
9.	Bidang PKK								
	a. Melaksanakan perencanaan 10 program PKK.	39	24	87	53	38	23	164	100
	b. Melaksanakan cerdas tangkas keluarga bahagia sejahtera.	29	18	76	46	59	36	164	100
	c. Melaksanakan lomba K3	73	46	82	50	9	4	164	100
	d. Mengikuti lomba P2WKSS tingkat Kabupaten.	15	9	82	50	67	41	164	100
10.	Bidang Pembangunan Sarana dan lingkungan hidup								
	a. Membantu pemugaran rumah sehat..	13	8	27	16	124	76	164	100
	b. Melaksanakan keindahan dan kesehatan lingkungan.	48	29	97	59	19	12	164	100
	c. Melaksanakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.	39	24	103	63	22	13	164	100

Dari .data di atas dapat dijelaskan pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD pada Desa-desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Alung sebagai berikut :

1. Pelaksanaan di bidang agama:

(a) Dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan, 45 orang

responden pengurus LKMD atau 27% ada melaksanakan pendidikan mental pada masyarakat, 75 orang responden LKMD atau 46% kadang-kadang melaksanakan pembinaan mental di masyarakat dan 44 orang responden pengurus LKMD atau 27% menyatakan tidak pernah melaksanakan pembinaan masyarakat. (b) Dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan terhadap penyuluhan undang-undang perkawinan diantaranya, 52 orang responden pengurus LKMD atau 32% ada memberikan penyuluhan terhadap undang-undang perkawinan di masyarakat, 87 orang responden pengurus LKMD atau 53% kadang-kadang memberikan penyuluhan undang-undang perkawinan terhadap masyarakat dan 25 orang responden pengurus LKMD atau 15% menyatakan tidak pernah memberikan penyuluhan undang-undang perkawinan di masyarakat. (c) Dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana keagamaan ternyata, 51 orang responden pengurus LKMD atau 31% ada melaksanakan pembangunan sarana keagamaan, 92 orang responden pengurus LKMD atau 56% kadang-kadang melaksanakan pembangunan sarana keagamaan dan 21 orang responden pengurus LKMD atau 13% tidak pernah melaksanakan pembangunan sarana keagamaan.

2. Pelaksanaan pendidikan dan P4;

(a) Dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan terhadap pelaksanaan penyuluhan P4, ternyata, 27 orang responden pengurus LKMD atau 16% ada melaksanakan penyuluhan P4 pada masyarakat, 56 orang responden pengurus LKMD atau 35% kadang-kadang melaksanakan penyuluhan P4 pada masyarakat dan 81 orang responden pengurus LKMD atau 49% tidak pernah melaksanakan penyuluhan P4 pada masyarakat. (b) Terhadap pembentukan kelompok simulasi P4

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD, 23 orang responden pengurus LKMD atau 14% ada melaksanakan pembentukan kelompok Simulasi P4 dan 62 orang responden pengurus LKMD atau 38% tidak pernah melaksanakan pembentukan kelompok Simulasi P4. (c) Pelaksanaan pendidikan, latihan dan kursus keterampilan, ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD, 21 orang responden pengurus LKMD atau 13% ada melaksanakan kursus keterampilan pada masyarakat, 37 orang responden pengurus LKMD atau 23% kadang-kadang melaksanakan kursus keterampilan pada masyarakat dan 106 orang responden pengurus LKMD atau 64% tidak pernah melaksanakan kursus keterampilan pada masyarakat.

3. Pelaksanaan bidang K3;

(a) Dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan terhadap pelaksanaan ronda malam yaitu; 31 orang responden pengurus LKMD atau 19% ada melaksanakan ronda malam, 122 orang responden pengurus LKMD atau 74% kadang-kadang melaksanakan ronda malam dan 71 orang responden pengurus LKMD atau 7% tidak pernah melakukan ronda malam. (b) Pelaksanaan pembuatan Pos ronda, ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD, 15 orang responden pengurus LKMD atau 9% ada membuat Pos-pos ronda, 29 orang responden pengurus LKMD atau 18% kadang-kadang membuat Pos-pos ronda dan 120 orang responden pengurus LKMD atau 73% tidak pernah membuat Pos-pos ronda. (c) Pelaksanaan latihan HANSIP/WANRA, 15 orang responden pengurus LKMD atau 9% kadang-kadang melaksanakan latihan HANSIP/WANRA dan 141 orang responden pengurus LKMD atau 86% tidak pernah melaksanakan latihan HANSIP/WANRA. (d) Pelaksanaan bantuan hukum, dari 164 orang responden pengurus

LKMD, atau 6% ada melaksanakan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan, 21 orang responden atau 13% kadang-kadang melaksanakan bantuan hukum terhadap orang yang membutuhkan dan 130 orang responden pengurus LKMD atau 79% tidak pernah memberikan bantuan hukum terhadap orang yang membutuhkan.

4. Pelaksanaan bidang penerangan;

(a) Dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan, 91 orang responden pengurus LKMD atau 55% ada memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang politik pancasila, 45 orang responden memberikan penyuluhan atau 27% kadang-kadang memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang politik pancasila dan 28 orang responden pengurus LKMD atau 18% tidak pernah melaksanakan penyuluhan pada masyarakat tentang politik pancasila.

(b). Terhadap pembentukan kelompok Kelompencapir, ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD atau 16% ada melaksanakan pembentukan Kelompencapir di masyarakat, 72 orang responden pengurus LKMD atau 44% kadang-kadang melaksanakan pembentukan Kelompencapir di masyarakat dan 65 orang responden pengurus LKMD atau 40% tidak pernah melaksanakan pembentukan Kelompencapir di masyarakat. (c) Pelaksanaan asah terampil kelompencapir dari 164 orang responden pengurus LKMD, ternyata 23 orang responden pengurusLKMD atau 14% ada melaksanakan asah terampil antar Desa, 83 orang responden pengurusLKMD atau 51% kadang-kadang melaksanakan asah terampil kelompencapir antar desa dan 58 orang responden pengurus LKMD atau 35% tidak pernah melaksanakan asah terampil kelompencapir antar Desa.

5. Pelaksanaan bidang perekonomian dan koperasi;

(a) Pelaksanaan P3A, ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD, 31 orang responden pengurus atau 19% ada melaksanakan pembinaan P3A, 65 orang responden pengurus LKMD atau, 40% kadfang melaksanakan pembinaan P3A, 68 orang responden atau 41% tidak pernah melaksanakan pembinaan P3A. (b) Terhadap produksi tanaman pangan ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD, 72 orang responden pengurus LKMD atau 44% ada melaksanakan usaha produksi tanaman pangan, 58 orang responden pengurus LKMD atau 35% tidak pernah melakukan produksi tanaman pangan. (c) Pelaksanaan usaha peternakan dan perikanan, ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD, 41 orang responden pengurus LKMD atau 25% ada melaksanakan usaha peternakan dan perikanan, 59 orang responden pengurus LKMD atau 36% kadang-kadang melaksanakan usaha peternakan dan perikanan 64 orang responden pengurus atau 39% tidak pernah melaksanakan usaha peternakan dan perikanan. (d) Pelaksana KUD, dari 164 orang responden pengurus LKMD, 40 orang responden atau 24% ada melaksanakan usaha ekonomi bersama KUD dengan ekonomi lainnya di desa, 83 orang responden pengurus LKMD atau 51% kadang-kadang melaksanakan usaha bersama antara KUD dengan usaha ekonomi lainnya di desa, 41 orang responden pengurus LKMD atau 25% tidak pernah melaksanakan usaha bersama antara KUD dengan ekonomi usaha lainnya di desa. (e) Penyuluhan KUD, dari 164 orang responden pengurus LKMD, 40 orang responden pengurus LKMD atau 24% melaksanakan pentingnya KUD di masyarkat, 83 orang responden pengurus LKMD atau 51 % kadang-kadang memberikan penyuluhan tentang KUD di masyarakat, 41 orang responden pengurus

LKMD atau 25% tidak pernah melaksanakan penyuluhan tentang pentingnya KUD di masyarakat.

6. Pelaksanaan bidang kesehatan kependudukan dan KB;
(a) Pembinaan Posyandu, ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan, 33 orang responden pengurus LKMD atau 20% ada melaksanakan pembinaan Posyandu di masyarakat, 22 orang responden pengurus LKMD atau 13% tidak pernah melaksanakan pembinaan Posyandu di masyarakat. (b) Penyuluhan tentang MCK, ternyata dari 164 orang responden LKMD menyatakan, 45 orang responden pengurus LKMD atau 27% ada melaksanakan penyuluhan terhadap pentingnya MCK bagi kesehatan masyarakat, 97 orang responden pengurus LKMD atau 60% kadang-kadng melaksanakan penyuluhan terhadap pentingnya MCK bagi kesehatan masyarakat, 22 orang responden pengurus LKMD atau 13% tidak pernah melaksanakan penyuluhan terhadap KB, ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan, 86 orang responden pengurus LKMD atau 53% ada melaksanakan penyuluhan KB terhadap masyarakat, 56 orang responden pengurus LKMD atau 34% kadang-kadang melaksanakan penyuluhan KB terhadap masyarakat, 22 orang responden pengurus atau 13% tidak pernah melaksanakan penyuluhan KB terhadap masyarakat.

7. Pelaksanaan bidang Pemuda, Olah raga dan Kesenian;
(a) Pembentukan club-club cabang olah raga dan kesenian, ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan, 33 orang resp[onden pengurus LKMD atau 20% ada melaksanakan pembentukan club-club cabang olah raga dan kesenian, 89 orang responden pengurus LKMD atau 54 % kadang-kadang melaksanakan pembentukan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

club-club cabang olah raga dan kesenian, 42 orang responden pengurus LKMD atau 26% tidak pernah melaksanakan pembentukan club-club cabang olah raga dan kesenian. (b) Pembinaan kenakalan ramaja, ternyata dari 164 orang responden menyatakan, 47 orang responden pengurus LKMD atau 27% ada melaksanaknan pembinaan terhadap kenakalan remaja, 103 orang responden pengurus LKMD atau 64% kadang-kadang melaksanakan pembinaan kenakalan remaja, 14 orang responden pengurus LKMD atau 9% tidak pernah melaksanakan pembinaan mental pada kenakalan remaja di Desa. (c) Pertandingan tiap cabang olah raga, ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan, 22 orang responden atau 13% ada melaksanakan pertandingan cabang olah raga antar Desa, 86 orang responden pengurus atau 52% kadang-kadang mengadakan pertandingan cabang olahraga antar desa, 56 orang responden pengurus LKMD atau 35% tidak pernah melaksanakan pertandingan anatar desa.

8. Pelaksanaan bidang kesejahtraan sosial;

(a) penyantunan anak terlantar dan jompo, ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan, 12 orang responden pengurus LKMD atau 7 % ada melaksanakan penyantunan anak terlantar dan jompo, 30 orang responden pengurus LKMD atau 18% kadang-kadang melaksanakan penyantunan anak terlantar dan jompo, 122 orang responden pengurus LKMD atau 75 % tidak pernah melaksanakan penyantunan anak terlantar dan jompo. (b) dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan terhadap bantuan ekonomi lemah pada masyarakat, 7 orang responden pengurus LKMD atau 4 % ada melaksanakan bantuan modal usaha untuk masyarakat ekonomi lemah, 15 orang responden pengurus LKMD atau 9 % kadang-kadang

melaksanakan bantuan modal usaha untuk masyarakat ekonomi lemah, 142 orang responden pengurus LKMD atau 87% tidak pernah membantu modal usaha terhadap masyarakat ekonomi lemah, (c) dari 164 orang responden pengurus LKMD, menyatakan terhadap peningkatan pengetahuan PSM, 5 orang responden pengurus LKMD atau 3% membantu meningkatkan pengetahuan PSM, 13% responden pengurus LKMD atau 8% kadang-kadang membantu meningkatkan pengetahuan PSM, 146 orang responden pengurus LKMD atau 89% tidak pernah membantu meningkatkan pengetahuan PSM.

9. Pelaksanaan bidang PKK;

(a) Terhadap pelaksanaan perencanaan 10 program PKK dari 164 orang pengurus LKMD, 39 orang responden pengurus LKMD atau 24% ada melaksanakan perencanaan 10 program PKK, 87 orang responden LKMD atau 53% kadang-kadang melaksanakan perencanaan 10 program PKK, 38 orang pengurus LKMD atau 23% tidak pernah melaksanakan perencanaan 10 program PKK. (b) pelaksanaan cerdas tangkas KBS ternyata dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan, 29 orang responden pengurus LKMD atau 18% ada melaksanakan cerdas tangkas KBS antar desa, 76 orang responden pengurus LKMD atau 46% kadang-kadang melaksanakan cerdas tangkas KBS antar desa, 59 orang pengurus LKMD atau 36% tidak pernah melaksanakan cerdas tangkas KBS antar desa. (c) pelaksanaan lomba K3 dari 164 orang responden LKMD menyatakan, 73 orang responden pengurus LKMD atau 46% ada melaksanakan lomba K3 antar desa, 82 responden pengurus LKMD atau 50% kadang-kadang melaksanakan lomba K3, 9 orang responden pengurus LKMD atau 4% tidak pernah melaksanakan lomba K3 antar desa. Lomba P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera) dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan, 15 orang responden atau 9% ada melaksanakan lomba P2WKSS tingkat Propinsi Sumatera Barat, 82 orang responden pengurus LKMD atau 50% kadang-kadang melaksanakan lomba P2WKSS tingkat Propinsi Sumatera Barat, 67 orang responden pengurus LKMD atau 41% tidak pernah melaksanakan lomba P2WKSS tingkat Propinsi Sumatera Barat.

10. Pelaksanaan bidang pembangunan sarana dan lingkungan hidup.

(a) Pemugaran rumah sehat dari 164 orang responden menyatakan, 13 orang responden pengurus LKMD atau 8% ada melaksanakan bantuan pemugaran rumah sehat, 27 orang responden pengurus LKMD atau 16% kadang-kadang melaksanakan bantuan pemugaran rumah sehat, 124 orang responden pengurus LKMD atau 76% tidak pernah melaksanakan bantuan pemugaran rumah sehat. (b) dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan, 48 orang responden pengurus LKMD atau 29% ada melaksanakan keindahan dan kesehatan lingkungan, 97 orang responden pengurus LKMD atau 59% kadang-kadang melaksanakan keindahan kesehatan lingkungan, 19 orang responden pengurus LKMD atau 12% tidak pernah melaksanakan keindahan kesehatan lingkungan. (c) pelaksanaan pelestarian sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dari 164 orang responden pengurus LKMD atau 24% ada melaksanakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, 103 orang responden pengurus LKMD atau 63% kadang-kadang melaksanakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, 22 orang responden pengurus LKMD atau 13% tidak pernah melaksanakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Dari data hasil analisis di atas terhadap pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD pada desa-desa/kelurahan di Kecamatan Lubuk Alung Dati II Padang Pariaman dapat disimpulkan sebagai berikut; 55% pada pelaksanaan penyuluhan kesadaran masyarakat terhadap politik Pancasila, 53% pada penyuluhan KB masyarakat, 46% pada pelaksanaan lomba K3, 44% pada pelaksanaan usaha produksi tanaman pangan, 32% pada pelaksanaan penyuluhan Undang-Undang Perkawinan, 31% pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, 29% pada pelaksanaan keindahan lingkungan, 27% pada pelaksanaan pembinaan kenakalan remaja. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan program LKMD pada desa-desa/kelurahan di Kecamatan Lubuk Alung Dati II Padang Pariaman sudah terlaksana dengan cukup baik.

TABEL 2

HAMBATAN KEGIATAN PELAKSANAAN
PROGRAM LKMD

No.	Jenis Hambatan	f	%
1.	Menurut pendapat Bapak/Ibu, Kurang terlaksananya pelaksanaan kegiatan program LKMD disebabkan oleh :		
	a. Kurangnya pengetahuan pengurus LKMD terhadap arti, tujuan dan fungsi keberadaan LKMD di Desa.	103	63
	b. Kurangnya dukungan dari lapisan masyarakat terhadap pelaksanaan program LKMD di Desa.	31	19
	c. Kurangnya pengetahuan KUPDK dalam membina/membimbing para pengurus LKMD dalam merencanakan pembangunan Desa.	30	16
	Jumlah	164	100
2.	Mungkinkah kurang terlaksana kegiatan program LKMD disebabkan juga oleh :		
	a. Kurangnya kerja sama antara ketua umum LKMD, dengan Ketua I beserta ketua-ketua seksi di LKMD.	99	60
	b. Setiap dana Bangdes yang diturunkan ke Desa, Ketua I bersama anggota ketua seksi lainnya jarang diikut sertakan dalam pelaksanaan uang Bangdes tersebut.	45	27
	c. Pengawasan/pembinaan dari ketua LKMD tingkat Kecamatan jarang dilakukan.	13	8
	d. Pertemuan secara berkala tingkat LKMD Kecamatan dengan aparat LKMD tingkat Desa tidak berjalan dengan semestinya.	7	5
	Jumlah	164	100
3.	Apakah hambatan lainnya dapat juga disebabkan oleh:		
	a. Dana Bangdes tidak mencukupi	87	53

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
PADANG

1	2	3	4
	b. Sarana/fasilitas yang tersedia tidak memadai.	15	9
	c. Perencanaan pembangunan Desa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.	8	5
	d. Kepala Desa selalu berjalan sendiri dalam setiap perencanaan tanpa menghiraukan fungsi LKMD.	54	33
	Jumlah	164	100

Berdasarkan pada tabel 2 data terhadap hambatan pelaksanaan program kegiatan LKMD oleh pengurus LKMD pada Desa-desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Alung adalah sebagai berikut. Dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan, 103 orang responden pengurus LKMD atau 63% kurang pengetahuan pengurus LKMD terhadap arti dan fungsi keberadaan LKMD di Desa, 31 orang responden pengurus LKMD atau 19% kurangnya dukungan dari lapisan masyarakat terhadap pelaksanaan program LKMD, 30 orang responden pengurus LKMD atau 18% kurangnya pengetahuan KUPDK dalam merencanakan kebutuhan pembangunan Desa. Selanjutnya dari 164 orang pengurus LKMD, 99 orang responden pengurus LKMD atau 60% kurangnya kerja sama antara Ketua Umum LKMD dengan Ketua I beserta Ketua-ketua seksi di LKMD, 45 orang responden pengurus atau 27% setiap dana Bangdes turun ke Desa, Ketua I bersama anggota jarang diikut sertakan dalam pelaksanaan uang Bangdes, 13 orang responden pengurus LKMD atau 8% pengawasan/pembinaan dari Ketua LKMD tingkat Kecamatan jarang dilakukan, 7 orang responden pengurus LKMD atau 5% pertemuan secara berkala tingkat kecamatan dengan aparat LKMD tingkat desa tidak berjalan dengan semestinya. Kemudian dari 164

orang responden juga menyatakan hambatan pelaksanaan kegiatan program LKMD, 87 orang responden pengurus LKMD atau 53% dana bangdes tidak mencukupi, 15 orang responden pengurus LKMD atau 9% sarana/fasilitas yang tersedia tidak memadai, 8 orang responden pengurus LKMD atau 5% perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan 54 orang responden pengurus LKMD atau 33% menyatakan kepala desa selalu berjalan sendiri dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan tanpa menghiraukan fungsi LKMD.

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas bahwa hambatan pelaksanaan kegiatnan program LKMD oleh pengurus LKMD pada desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu: sebanyak 63% hambatan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pengurus LKMD terhadap arti dan fungsi keberadaan LKMD di desa, 60% hambatan disebabkan oleh kurangnya kerja sama antara ketua umum LKMD dengan anggota-anggotanya di LKMD, 53% hambatan disebabkan oleh dana bangdes tidak mencukupi untuk merangsang pembangunan desa, 33% hambatan disebabkan oleh kepala desa yang selalu berjalan sendiri dalam merencanakan dan melaksanakan proyek tanpa menghiraukan fungsi LKMD, 19% kurangnya dukungan dari lapisan masyarakat dan 18% disebabkan oleh tingkat pengetahuan KUPDK (Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan) kurang mampu merencanakan kebutuhan pembangunan desa.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

TABEL 3

USAHA PEMECAHAN HAMBATAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PROGRAM LKMD

No.	Alternatif Jenis Usaha Pemecahan Hambatan	f	%
1.	Apabila Bapak/Ibu menemui hambatan dalam perencanaan pembangunan Desa, apakah usaha-usaha yang Bapak/Ibu lakukan untuk memecahkan kegagalan perencanaan tersebut:		
	a. Membiarkan perencanaan yang gagal.	47	29
	b. Mengundang kembali ketua seksi/anggota LKMD.	68	41
	c. Meminta bantuan KUPDK/Pembina LKMD Kecamatan/seluruh aparat pemerintahan Kecamatan yang terkait dalam pembangunan Desa untuk menjelaskan pentingnya perencanaan pembanguna Desa.	49	30
	Jumlah	164	100
2.	Selanjutnya apabila Bapak/Ibu menemui hambatan dalam pelaksanaan program LKMD dari seseorang oknum masyarakat terhadap pembangunan Desa, apa usaha yang Bapak/Ibu lakukan terhadap oknum tersebut:		
	a. Membiarkan oknum tersebut.	13	8
	b. Melaporkan oknum tersebut kepada Camat dan Kepolisian.	40	24
	c. Mengundang pemuka-pemuka masyarakat/kepala kaum/kepala suku guna merealisasi oknum tersebut.	59	36
	d. Cukup ditangani oleh keamanan Desa saja.	52	32
	Jumlah	164	100
3.	Setiap pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah jelas akan menimbulkan pengorbanan baik perasaan maupun material, bahkan sampai ratusan hektar tanah habis dikosongkan untuk pembangunan. Bagaimana usaha Bapak untuk memecahkan hal tersebut:		

No.	Alternatif Jenis Usaha Pemecahan Hambatan	f	%
	a. LKMD hanya mematuhi saja kehendak pemerintah.	43	26
	b. Pembangunan disetujui LKMD dengan penggantinan material masyarakat realistis/ atau dapat diterima oleh akal, dalam arti tidak merugikan masyarakat.	57	35
	Jumlah	164	100

Berdasarkan data pada tabel 3 terhadap usaha pemecahan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung dapat diuraikan sebagai berikut. Dari 164 orang responden pengurus LKMD, 47 orang responden pengurus LKMD atau 29% menyatakan membiarkan setiap perencanaan yang gagal, 68 orang responden pengurus LKMD atau 41% menyatakan mengundang kembali ketua-ketua seksi yang ada di LKMD, 49 orang responden pengurus LKMD atau 30% menyatakan meminta bantuan KUPDK, pembina LKMD Kecamatan, aparat pemerintah Kecamatan yang terkait untuk menjelaskan pentingnya perencanaan pembangunan Desa. Selanjutnya dari 164 responden pengurus LKMD menyatakan terhadap seseorang oknum yang mencoba-coba menghalangi jalannya pembangunan Desa, yaitu; 13 orang responden pengurus LKMD atau 8% membiarkan oknum tersebut, 40 orang responden pengurus LKMD atau 24% melaporkan oknum tersebut ke LKMD atau 36% mengundang Pemuka-pemuka masyarakat, Kepala kaum/Kepala suku guna merealisasi oknum tersebut, 52 orang responden LKMD atau 32% menyatakan cukup ditangani oleh keamanan Desa saja. Kemudian dari 164 orang responden pengurus LKMD menyatakan terhadap pelaksanaan pembangunan pemerintah yang membutuhkan lokasi di daerah

kekuasaan pedesaan antara lain 64 orang responden pengurus LKMD atau 39% menyatakan memecahkan masalah dengan memberikan pengertian pada masyarakat terhadap manfaat pembangunan bagi masyarakat dan negara, 43 orang responden pengurus LKMD atau 26% bila ada pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, LKMD hanya bisa menyetujui saja dan 57 orang responden pengurus LKMD atau 35% pelaksanaan pembangunan boleh dilaksanakan dengan penggantian material harus dapat diterima oleh akal sehat masyarakat artinya tidak merugikan masyarakat pedesaan.

Dari hasil analisis data pada tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha pemecahan hambatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan program LKMD di lapangan oleh pengurus LKMD pada desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung adalah sebagai berikut: Sebanyak 41% usaha pemecahan adalah membiarkan perencanaan yang gagal, 39% usaha pemecahan dilakukan dengan jalan memberikan pengertian pada masyarakat terhadap manfaat pembangunan pedesaan, 36% usaha pemecahan hambatan adalah dengan jalan mengundang kembali pemuka-pemuka masyarakat, kepala-kepala kaum, kepala-kepala suku untuk merealisasikan masyarakat dalam pembangunan, 35% LKMD menyetujui pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan penggantian material harus dapat diterima oleh akal sehat masyarakat artinya tidak merugikan masyarakat pedesaan baik perasaan maupun materialnya.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

TABEL 4

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD

N	Alternatif Pelaksanaan Program	f	%
1.	Pelaksanaan kegiatan program LKMD, selama I repelita di Desa-desa apakah menurut Bapak/Ibu sudah berjalan dengan baik.	26	16
2.	Bila semua program LKMD dengan segala aspek nya terlaksana dengan baik, apakah menurut Bapak/Ibu keadilan, kesejahteraan akan cepat terwujud?	27	36
3.	Bila kesejahteraan hidup rakyat di pedesaan sudah merata apakah menurut Bapak/Ibu akan dapat menjamin stabilitas keamanan bangsa dan negara?	49	30
4.	Guna meningkatkan kualitas kerja para pengurus LKMD apakah menurut Bapak/Ibu perlu diadakan suatu penataran khusus bagi pengurus LKMD di pedesaan?	62	38
	J u m l a h	164	100

Dari data persepsi pengurus LKMD pada Tabel 4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari 164 orang responden pengurus atau 100%, 26 orang responden pengurus atau 16% mengatakan pelaksanaan kegiatan program LKMD sudah berjalan dengan baik, 27 orang responden pengurus LKMD atau sama 16% mengatakan bila semua program LKMD dengan segala aspek terlaksana dengan baik kesejahteraan dan keadilan akan cepat terwujud, 62 orang responden pengurus LKMD atau 38% mengatakan bila kesejahteraan hidup rakyat di pedesaan sudah merata maka akan menjamin stabilitas keamanan bangsa dan negara, 49 orang responden pengurus LKMD atau 30% berpendapat guna meningkatkan kualitas kerja pengurus LKMD perlu diadakan penataran khusus bagi pengurus LKMD di pedesaan.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Berdasarkan data di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persepsi pengurus LKMD terhadap pelaksanaan program LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung adalah sebagai berikut; sebanyak 38% responden menyatakan perlu diadakan penataran khusus bagi para pengurus LKMD pedesaan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kemampuan pengetahuan, kualitas kerja dan kualitas pelaksanaan program di lapangan. Selanjutnya sebanyak 30% responden berpendapat bila kesejahteraan rakyat di pedesaan sudah merata, maka akan terjamin stabilitas keamanan bangsa dan negara

B. Jawaban Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang dikemukakan yaitu; (1) Seberapa jauh pelaksanaan kegiatan program LKMD dapat dilaksanakan oleh pengurus LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung, (2) Seberapa jauh hambatan yang ditemui oleh pengurus LKMD dalam setiap pelaksanaan kegiatan program, (3) Seberapa jauh usaha pemecahan hambatan yang dapat dilakukan oleh pengurus LKMD, (4) Seberapa jauh pembinaan/pengawasan yang dilakukan oleh pembina, (5) Seberapa jauh persepsi pengurus LKMD terhadap pelaksanaan kegiatan program LKMD di Kecamatan Lubuk Alung.

Untuk menjawab semua pertanyaan di atas, semua data dan informasi yang diperoleh dari lapangan selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis deskriptif atau tabulasi frekuensi. Analisis ini dilakukan berdasarkan data dan informasi dari pengurus LKMD yang terdiri dari: Ketua Umum LKMD, Ketua I LKMD, Ketua II LKMD, Bendahara LKMD, Sekretaris LKMD dan Ketua-ketua seksi LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung Dati II Padang Pariaman.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADA

Berdasarkan data hasil penemuan penelitian yang terdapat pada tabel 1 halaman 32 sampai halaman 34, maka dengan ini pertanyaan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD akan dapat terjawab antara lain :

1. Seberapa jauh pengurus LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung dapat melaksanakan kegiatan program LKMD yang telah ditetapkan.

Jawaban pertama, bidang agama : (a) Pelaksanaan pendidikan/ pembinaan mental masyarakat sebanyak 27%, pelakasanaan penyuluhan undang-undang perkawinan 32%, pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana keagamaan 32% dengan kata lain dapat dikatakan cukup terlaksana. (b) Bidang pendidikan dan P4 : pelaksanaan penyuluhan P4 16%, pelaksanaan pembentukan kelompok simulasi P4 14%, pelaksanaan pendidikan/latihan kursus keterampilan masyarakat 13%, dengan kata lain dapat dikatakan kurang terlaksana. (c) Bidang K3: pelaksanaan ronda malam 19%, pelaksanaan pembuatan pos-pos ronda 9%, pelaksanaan latihan HANSIP/WANRA 5%, bantuan hukum terhadap masyarakat 6%, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bidang K3 kurang terlaksana. (d) Bidang penerangan: pelaksanaan penyuluhan politik Pancasila pada masyarakat 55%, pembentukan kelompencapir 16%, pelaksanaan asah terampil kelompencapir antara Desa 14%, bidang penerangan dapat dikatakan cukup terlaksana dengan baik. (e) Bidang perekonomian dan koperasi: pelaksanaan pembinaan P3A 19%, pelaksanaan produksi usaha tanaman pangan 44%, produksi usaha peternakan/perikanan 25%, penyuluhan penting KUD Desa 24%, pelaksanaan antara KUD dengan usaha ekonomi Desa 8%, dari data di

atas terhadap bidang perekonomian dan koperasi dapat dikatakan cukup terlaksana. (f) Bidang kesehatan kependudukan dan KB: pelaksanaan pembinaan Posyandu 20%, penyuluhan pentingnya MCK terhadap kesehatan masyarakat 27%, penyuluhan pentingnya KB di masyarakat 53%, dari pelaksanaan bidang kesehatan kependudukan dan KB dapat dikatakan cukup terlaksana dengan baik. (g) Bidang pemuda olah raga dan kesenian: pelaksanaan pembentukan club-club cabang olah raga dan kesenian 20%, pembinaan remaja 27%, pelaksanaan pertandingan antara Desa 13% dengan kata lain dapat dikatakan kurang terlaksana. (h) Bidang kesejahteraan sosial: penyantunan anak terlantar dan jompo 7%, membantu modal usaha masyarakat ekonomi lemah 4%, membantu meningkatkan pengetahuan PSM 3%, pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial dapat dikatakan kurang terlaksana. (i) Bidang PKK: pelaksanaan 10 program pokok PKK 24%, pelaksanaan cerdas tangkas keluarga bahagia 18%, pelaksanaan mengikuti lomba P2WKSS 9%, dengan kata lain pelaksanaan bidang PKK dapat dikatakan cukup terlaksana. (j) Bidang pembangunan sarana dan lingkungan hidup: pelaksanaan pemugaran rumag sehat 8%, melaksanakan keindahan dan kesehatan lingkungan 29 %, melaksanakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan 24% dengan kata lain pelaksanaan bidang pembangunan dan lingkungan hidup dapat dikatakan cukup terlaksana dengan baik.

2. Seberapa jauh hambatan yang ditemui oleh pengurus LKMD dalam setiap pelaksanaan kegiatan program.

Jawaban kedua: hambatnan yang banyak ditemui oleh para pengurus LKMD dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan program

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

adalah sebanyak 63% disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pengurus LKMD terhadap arti, fungsi dan tujuan keberadaan LKMD di Desa, sebanyak 60% kurangnya kerja sama antara Ketua Umum LKMD dengan Ketua I beserta Ketua-ketua seksi di LKMD, 53% disebabkan oleh dana Bangdes tidak memadai dan 33% disebabkan oleh Kepala Desa yang selalu berjalan sendiri dalam setiap perencanaan tanpa menghiraukan fungsi LKMD. Dengan kata lain hambatan pengurus dalam melaksanakan kegiatan program secara garis besar disebabkan oleh adanya kurang kerja sama sesama pengurus di tubuh LKMD.

3. OLeberapa jauh usaha pemecahan hambatan dapat dilakukan oleh pengurus LKMD.

Jawaban ketiga : terhadap usaha pemecahan masalah yang dilakukan oleh pengurus LKMD antara lain, adalah mengundang kembali Ketua-ketua seksi/anggota LKMD, mengundang pemuka-pemuka masyarakat/Kepala kaum atau suku untuk merealisasikan semua aspek yang dihadapi oleh masyarakat, dengan kata lain pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan program LKMD di Desa dapat dipecahkan sendiri oleh LKMD dan masyarakat.

4. Seberapa jauh pembinaan dari pembinaan/pengawasan yang dilakukan oleh pembina LKMD Kecamatan terhadap pengurus LKMD.

Jawaban keempat; pembinaan/pengawasan yang dilakukan oleh pembina LKMD Kecamatan adalah sebanyak 8% dengan kata lain pembinaan terhadap pengurus LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung oleh pembina LKMD tingkat Kecamatan dapat dikatakan kurang terlaksana dengan baik.

5. Seberapa jauh persepsi pengurus LKMD terhadap pelaksanaan kegiatan program LKMD di Kecamatan Lubuk Alung.

Jawaban kelima; sebanyak 16% pengurus berpendapat bahwa pelaksanaan kegkiatan program LKMD selama repelita V berjalan dengan baik, 36% pengurus berpendapat bila semua program LKMD terlaksana dengan baik, maka keadilan dan kesejahteraan rakyat akan cepat terwujud, 30% pengurus LKMD berpendapat bila kesejahteraan hidup rakyat sudah merata maka akan dapat menjamin stabilitas keamanan bangsa dan negara dan sebanyak 38% responden pengurus LKMD berpendapat tentang perlunya suatu penataran khusus bagi pengurus LKMD di pedesaan. Dengan kata lain persepsi pengurus LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung Dati II Padang Pariaman terhadap pelaksanaan kegiatan program LKMD adalah perlunya diadakan penataran khusus LKMD.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sebanyak 5 (lima) pertanyaan penelitian yang diajukan dalam pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD pada Desa-desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Alung Dati II Padang Pariaman terjawab dan terbukti kebenarannya.

C. Pembahasan/Diskusi

Berdasarkan pada hasil penemuan penelitian dan pembuktian pertanyaan penelitian, maka perlu dibahas, masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program LKMD pada Desa-desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Alung Dati II Padang Pariaman. Pembahasan ini akan dikhususkan terhadap variabel-variabel yang terutama berkaitnan dengan pertanyaan penelitian yang telah

ditetapkan.

LKMD dilihat dari teori organisasi modern dipandang "sebagai suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang berhubungan, teori ini menilai efektifitas LKMD berdasarkan kriteria sistem yang diangkat dari konsep kebutuhan dan merupakan sistem sosial yang hidup (GHARPADL.1971:8). Selanjutnya pelaksanaan kegiatan program LKMD menurut teori sistem harus menggambarkan "siklus, input proses-output dan hubungan dengan lingkungan yang luas "(Gibson dkk. 1973:47).

Berdasarkan teori di atas, maka masalah-masalah perencanaan/usulan proyek dan pelaksanaan kegiatan program hendaknya pertama menampung semua input baik dari kalangan masyarakat, pemerintah maupun swasta. Semua input yang masuk ke tubuh LKMD hendaknya dipilih sedemikian rupa artinya input yang masuk itu apakah sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Desa, untuk kemudian memprosesnya dan mengkemasnya menjadi suatu sasaran tujuan kegiatan pelaksanaan program LKMD. Apakah input dan pelaksanaan itu terlaksana atau tidak hal ini akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa.

Seorang ahli dalam studinya tentang komponen effektivitas dalam organisasi kecil menganggap "organisasi LKMD sebagai komponen yang saling bergantung melalui mana tenaga disalurkan atau dipindahkan. Pertukaran tenaga terjadi pada organisasi lembaga itu sendiri dengan lingkungannya. " Selanjutnya menurut definisi ini, kriteria efektifitas memperhitungkan; "(a)kemampuan organisasi kematangan, (b) derajat sejauh mana organisasi dapat memanfaatkan anggota-anggotanya, (3) derajat sejauh mana

organisasi mempunyai nilai terhadap masyarakat luas" (Frank Friedlander dan Hal Pikle. 1971). Untuk mendapat hasil perencanan dan pelaksanaan LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung, maka peranan perencanaan dalam LKMD sangat dibutuhkan. "Perencanaan sebagai pengambilan keputusan dalam hal ini sesungguhnya merencanakan berarti usaha tertentu secara sadar sistematik untuk mengatasi sesuatu keadaan yang apabila tidak diatasi akan dapat menimbulkan masalah bagi organisasi" (Sondang P.Siagian. 1989:70).

Guna memecahkan masalah dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung ada baiknya semua pengurus LKMD mengikuti langkah-langkah perencanaan sebagai berikut: (1) mendefinisikan hakekat permasalahan, (2) pengumpulan data dan analisisnya, (3) mengidentifikasi dan penentuan berbagai alternatif, (4) menganalisis berbagai alternatif, (5) memilih salah satu alternatif, (6) pelaksanaan alternatif terpilih dan (7) penilaian hasil yang dicapai "(Sondang P.Siagian. 1989:78). Selanjutnya pelaksanaan kegiatan program LKMD akan terlaksana dengan yang diharapkan, maka dalam hal ini penting sekali ditekankan bahwa dalam turut serta berperan maka fungsi pembinaan/bimbingan dan pengawasan baik pengawasan fungsional, pengawasan sosial sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan LKMD tersebut. "Kunci keberhasilnan terletak pada rasa tanggung jawab yang besar. Dan semua pihak terikat pada rasa tanggung jawab tersebut karena menyangkut kehidupan bersama dalam tatanan Negara Bangsa yang berdasarkan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Pancasila dan Unadang-undang Dasar 1945" (Sondang P.Siagian. 1989:205).

1. Pelaksanaan kegiatan program LKMD.

Fungsi LKMD dalam hal ini adalah membantu pemerintah Desa/Kelurahan di bidang pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut, dan menumbuhkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan data yang terkumpul melalui penelitian ini ternyata pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD pada Desa-desa/Kelurahan di Kecamatan Lubuk Alung Dati II Padang Pariaman, dapat dikatakan "Cukup terlaksana dengan baik" dengan perincian secara garis besar adalah sebagai berikut: (1) Penyuluhan kesadaran masyarakat terhadap politik Pancasila 53%, (2) Pelaksanaan lomba K3 46%, (3) Pelaksanaan usaha produksi tanaman pangan 44%, (4) Pelaksanaan penyuluhan Undang-undang perkawinan 32%, (5) Pelaksanaan pembangunan sarana/parasarana keagamaan 31%, (6) Pelaksanaan keindahan lingkungan 27%.

2. Hambatan pelaksanaan program LKMD

Berdasarkan data hasil perencanaan penelitian, maka hambatan pelaksanaan kegiatan program LKMD oleh pengurus LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung, dapat dirinci sebagai berikut : (1) Sebanyak 63% hambatan disebabkan "kurangnya pengetahuan pengurus LKMD terhadap arti, fungsi dan tujuan keberadaan LKMD di pedesaan", (2) Kemungkinan kedua yaitu sebanyak 60% disebabkan oleh kurangnya kerjasama antara Ketua Umum LKMD, Ketua I, dan Seksi-seksi yang ada di LKMD, (3) Hambatan sebanyak 33% disebabkan oleh Kepala Desa yang selalu

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

berjalan sendiri.

3. Usaha Pemecahan.

Usaha pemecahan terhadap hambatan pelaksanaan kegiatan program LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Memberikan pengertian pada masyarakat terhadap manfaat pembangunan pedesaan sebanyak 39%, sebanyak 36% adalah mengundang pemuka-pemuka masyarakat/Kepala-kepala kaum/suku untuk merealisasikan semua aspek kegiatan pembangunan di pedesaan dan pemecahan terhadap pembangunan yang didirikan oleh pemerintah di Lokasi pedesaan sebanyak 35% LKMD menyetujui pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan penggantian material harus dapat diterima oleh akal sehat masyarakat artinya tidak merugikan masyarakat pedesaan baik perasaan maupun materialnya.

4. Pembinaan/bimbingan dari pembina LKMD Kecamatan.

Berdasarkan data yang ditemui melalui penelitian ini ternyata pembinaan/pengawasan dari pembina LKMD tingkat Kecamatan yaitu sebanyak 8%, dengan kata lain pelaksanaan pengawasan/pembinaan dari pembina LKMD tingkat Kecamatan dapat dikatakan sangat kurang.

5. Persepsi pengurus LKMD terhadap pelaksanaan program.

Dari berbagai pendapat yang dapat dihimpun melalui penemuan penelitian ini, maka dapat diuraikan persepsi pengurus sebagai berikut: (1) Pelaksanaan kegiatan program LKMD sebanyak 16% selama pelita V berjalan dengan baik, (2) 36% berpendapat bila semua program LKMD terlaksana maka keadilan dan kesejahteraan akan cepat terwujud, (3) 30% pengurus mengatakan bila

kesejahteraan hidup rakyat sudah merata maka akan terjamin stabilitas keamanan bangsa dan negara, (4) Sebanyak 38% pengurus menyatakan perlu adanya penataran khusus bagi pengurus LKMD yang dikelola langsung oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penemuan penelitian di atas, untuk meningkatkan fungsi dan peranan LKMD secara efisien dan efektif maka sangat mendasar sekali pihak yang berwenang memberikan penataran-penataran terhadap pengurus LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung khususnya dan Dati II umumnya. Dengan adanya penataran diharapkan dimasa datang pengurus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan LKMD di pedesaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab V ini akan dibicarakan Kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian.

A. Kesimpulan Penelitian

1. Pelaksanaan kegiatan program LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung:
   a. Pelaksanaan bidang agama oleh pengurus LKMD dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.
   b. Pelaksanaan bidang pendidikan dan P4 oleh pengurus LKMD dapat dikatakan terlaksana cukup baik.
   c. Pelaksanaan bidang K3 dapat dikatakan kurang terlaksana dengan baik.
   d. Pelaksanaan bidang penerangan dapat dikatakan dengan terlaksana cukup baik.
   e. Pelaksanaan bidang perekonomian dan koperasi dapat dikatakan terlaksana dengan baik.
   f. Pelaksanaan bidang pemuda olah raga dan kesenian dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik.
   g. Pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial dapat dikatakan kurang terlaksana dengan baik.
   h. Pelaksanaan bidang PKK dapat dikatakan cukup terlaksana dengan baik.
   i. Pelaksanaan bidang pembangunan sarana dan lingkungan hidup dapat dikatakan kurang terlaksana dengan baik.

   Kemudian kalau ditarik secara rata-rata dari kesepuluh bidang kegiatan program LKMD yang dilaksanakan oleh pengurus LKMD pada Desa-desa di Kecamatan Lubuk Alung

adalah sebanyak 71%, dengan kata lain pelaksanaan kegiatan program LKMD dapat dikatakan terlaksana dengan cukup baik.

2. Hambatan pelaksanaan program LKMD pada dasarnya disebabkan, (1). Kurangnya pengetahuan pengurus terhadap arti, fungsi dan tujuan LKMD di pedesaan, (2) Kurangnya kerja sama antara Ketua Umum LKMD, Ketua I dan anggota LKMD lainnya, (3) Dana Bangdes tidak mencukupi.
3. Usaha pemecahan hambatan pelaksanaan kegiatan program LKMD pada dasarnya dilakukan melalui: (1) Mengundang kembali seluruh pengurus LKMD mengadakan rapat, (2) Mengundang pemuka-pemuka masyarakat/Kepala kaum/suku guna merealisasikan semua aspek pembangunan di pedesaan.
4. Pembinaan/pengawasan yang dilakukan oleh pembina LKMD tingkat Kecamatan dapat dikatakan kurang sekali.
5. Persepsi pengurus LKMD terhadap pelaksanaan kegiatan program cukup baik.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan kepada pembina LKMD tingkat I, tingkat II, tingkat Kecamatan, agar secepatnya mengambil suatu kebijaksanaan baru dan dengan polanya yang baru dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sosial para pengurus LKMD di pedesaan.
2. Khusus bagi pembina LKMD Kecamatan dan KUPDK, agar secara rutin mengadakan Temukarya LKMD secara bergiliran pada setiap Desa.
3. Bagi Ketua Umum LKMD janganlah bekerja sendiri dalam merencanakan pembangunan Desa, hendaknya Ketua Umum mampu

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

berorientasi kepada "TUTWURI HANDAYANI".

4. Bagi pusat pengabdian pada masyarakat IKIP Padang, agar benar-benar membekali ilmu pengetahuan serta aplikasinya di lapangan bagi mahasiswa yang akan terjun KKN.
5. Kepada semua pengurus LKMD, agar berusaha semaksimal mungkin bekerja sukarela menggerakkan partisipasi masyarakat untuk membangun desanya sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Friedlander,J.L.dan H.Pickle.(1971). Components of Organicati-Effectiveness dalam Assesment of Organicational Goodyear Publishing Company Inc.

Gibson,J.L.(1973).Organications: Structure,Process,Bihaviour. Dallas, Texas:Business Publishing Inc.

Georgepoulos,B.S.dan A.ST.Tannembaun.(1971). A Studi of Organicational Effektiveness dalam Assessment of Organicational Effektiveness(ed.Ghorpade,J).Pasific Palisades California: Goodyear Publishing Company,Inc.

Katz,D.dan R.L.Kahn.(1966). The Social Psychology of Organication. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Rice,O.E.(1971). A Model For The Emperical Study of Large Social Organication dalam Assessment of Organication Effektiveness. (ed.Ghorpade,J.) Pacipic Palisades, California: Goodyear Publishing Company, Inc.

Raka Jono,T.(1980) Suatu Kasus Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi. DEPDIKBUD, Jakarta.

Siagian,Sondang,P.(1989). Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta: PT.Bina Aksara.

.....,(1982).Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan. Jakarta: PT.Gunung Agung.

.....,(1984).Bunga Rampai Management Modern. Jakarta:PT Gunung Agung.

....., (1989).Buku Pedoman LKMD. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa.

....., (1991).Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Jakarta, Armas Duta.

....., (1988).Pedoman Pelaksanaan Tugas Sehari-hari Kepala Desa.Jakarta, Direktorat Jenderal Puod Departemen Dalam Negeri RI.

....., (1987).Penerangan Pembangunan Bidang POLKAM. Propinsi Sumatera Barat, Kanwil Deppen.

....., (1983).Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Proyek Hasil Bantuan Pembangunan Desa Bidang Lumbung Padi. Propinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa.

.....,(1983).Persiapan Penyusunan Usul Rencana Program/-Proyek Tahun Anggaran 1982/1983. Propinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Lampiran I

INSTRUMEN PENELITIAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD PADA DESA-DESA DI KECAMATAN LUBUK ALUNG DATI II PADANG PARIAMAN TAHUN 1992

Dengan angket ini, saya selaku peneliti memohon dengan sangat pada Bapak/Ibu pengurus LKMD untuk memberikan jawaban pada pertanyaan yang benar, dan berilah tanda silang pada point a, b, c, d dan e.

Responden
LKMD/DESA/Kelurahan

I. Latar Belakang Pendidikan Pengurus LKMD

1. Ijazah tertinggi yang dimiliki Bapak/Ibu saat ini :
   a. SD/SR
   b. SLTP
   c. SLTA
   d. Sarmud
   e. Sarjana

2. Masa dinas Bapak/Ibu menjadi pengurus LKMD:
   a. 1 - 2 tahun
   b. 2 - 3 tahun
   c. 3 - 4 tahun
   d. 5 tahun keatas.

3. Keadaan Desa Bapak/Ibu saat ini termasuk kedalam Desa:
   a. Desa Swasembada
   b. Desa Swakarya
   c. Desa Swadaya

II. Pelaksanaan Kegiatan Program LKMD

A. Bidang Agama:

1. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan pendidikan/pembinaan mental pada masyarakat Desa:
   a. Ada
   b. Kadang-kadang
   c. Tidak pernah

2. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan penyuluhan undang-undang perkawinan terhadap masyarakat Desa:
   a. Ada
   b. Kadang-kadang
   c. Tidakm pernah

3. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan pembangunan sarana/prasarana keagamaan di masyarakat Desa:
   a. Ada
   b. Kadang-kadang
   c. Tidakm pernah

B. Bidang Pendidikan dan P4

4. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan penyuluhan tentang P4 pada masyarakat Desa;
   a. Ada
   b. Kadang-kadang
   c. Tidak pernah

5. Apakah ada, Bapak/Ibu melaksanakan pembentukan kelompok-kelompok simulasi P4 pada masyarakat Desa;
   a. Ada
   b. Kadang-kadang
   c. Tidak pernah

6. Apakah Bapak/Ibu ada juga melaksanakan pendidiknan/latihan kursus keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa;
   a. Ada
   b. Kadang-kadang
   c. Tidak pernah

C. Bidang K3

6. Adakah masyarakat Bapak/Ibu di Desa melaksanakan ronda malam demi keselamatan lingkungan ;
   a. Ada
   b. Kadang-kadang
   c. Tidak pernah

7. Adakah Bapak/Ibu membangun Pos-Pos ronda pada setiap Dusun/Korong kampung;
   a. Ada
   b. Kadang-kadang
   c. Tidak pernah

8. Apakah Bapak/Ibu juga melaksanakan bimbingan/latihan keterampilan terhadap HANSIP/WANRA di masyarakat Desa;
   a. Ada
   b. Kadang-kadang
   c. Tidak pernah

9. Apakah ada Bapak/Ibu melaksanakan pemberian hukum pada masyarakat Desa yang membutuhkan;
   a. Ada
   b. Kadang-kadang
   c. Tidak pernah

D. Bidang Penerangan

10. Adakah Bapak/Ibu memberikan penyuluhan Politik Pancasila terhadap keberhasilan pembangunan selama ini :
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

11. Adakah Bapak/Ibu melaksanaknan pembentukan kelompok kelompencapir di tiap Dusun:
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

12. Adakah Bapak/Ibu juga melaksanakan perlombaan asah terampil Kelompencapir antar Desa.
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

E. Bidang Perekonomian dan Koperasi

13. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan pembinaan terhadap P3A di masyarakat.
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

14. Adakah masyarakat Bapak/Ibu melaksanakan usaha produksi tanaman pangan.
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

15. Disamping usaha tanaman pangan, apakah ada juga masyarakat melaksanakan usaha peternakan, perikanan di Desa.
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

16. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan penyuluhan terhadap pentingnya KUD pada masyarakat Desa:
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

17. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan usaha bersama antara KUD dengan usaha ekonomi masyarakat Desa:
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

F. Bidang Kesehatan Kependudukan dan KB.

18. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan pembinaan terhadap POSYANDU Desa.
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

19. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan penyuluhan tentang pentingnya MCK demi kesehatan masyarakat di Desa.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG.

a. Ada
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

20. Apakah ada Bapak/Ibu memberikan penyuluhan tentang pentingnya KB pada masyarakat Desa.
a. Ada
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

G. Bidang Pemuda Olahraga dan Kesenian.

21. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan pembentukan club-club cabang olah raga dan kesenian.
a. Ada
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

22. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan pembinaan terhadap kenakalan anak muda di Desa.
a. Ada
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

23. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan pertandingan dari tiap cabang olahraga dan kesenian antar Desa.
a. Ada
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

H. Bidang Kesejahteraan Sosial.

24. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan penyantunan terhadap anak terlantar dan jompo di masyarakat Desa.
a. Ada
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

25. Apakah ada Bapak/Ibu memberikan modal bantuan usaha terhadap masyarakat ekonomi lemah di Desa.
a. Ada
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

26. Adakah Bapak/Ibu ikut juga membantu meningkatkan pengetahuan para pekerja sosial masyarakat (PSM) di Desa.
a. Ada
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

I. Bidang PKK.

27. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan perencanaan 10 program PKK di masyarakat Desa.
a. Ada
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

28. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan cerdas tangkas tentang Keluarga Bahagia Sejahtera di kalangan masyarakat Desa.
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

29. Adakah Bapak/Ibu mengikuti lomba K3 tingkat Kecamatan
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

30. Adakah Bapak/Ibu mengikuti lomba P2WKSS Tingkat Kabupaten.
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

J. Bidang Pembangunan Sarana dan Lingkungnan Hidup

31. Adakah Bapak/Ibu melaksanakan bantuan pemugaran rumah sehat di kalangan masyarakat Desa.
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

32. Adakah masyarakat Desa melaksanakan tata keindahnan dan kesehatan lingkungan.
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

33. Adakah Bapak/Ibu serta masyarakat Desa melaksanakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.
    a. Ada
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak pernah

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Program LKMD

34. Menurut pendapat Bapak/Ibu, kurang terlaksananya pelaksanaan kegiatan program LKMD disebabkan oleh:
    a. Kurangnya pengetahuan pengurus LKMD terhadap arti, fungsi dan tujuan LKMD di Desa.
    b. Kurangnya dukungan dari lapisan masyarakat terhadap pelaksanaan program LKMD di Desa.

35. Mungkinkah kurang terlaksananya kegiatan program LKMD disebabkan juga oleh:
    a. Kurangnya kerjasama antara Ketua Umum LKMD Desa dengan Ketua I serta anggota pengurus lainnya di LKMD.
    b. Ketua I LKMD beserta anggota lainnya di LKMD tidak pernah diikut sertakan pada setiap pelaksanaan uang Bangdes.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

c. Pengawasan/pembinaan dari Ketua LKMD tingkat Kecamatan jarang dilakukan.
d. Pertemuan secara berkala tingkst LKMD Kecamatan tidak berjalan semestinya.

36. Apakah mungkin juga hambatan lainnya dapat juga disebabkan oleh:
a. Dana Bangdes tidak mencukupi.
b. Sarana/fasilitas tidak memadai.
c. Perencanaan pembangunan Desa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
d. Kepala Desa selalu berjalan sendiri dalam setiap perencanaan tanpa menghiraukan fungsi LKMD di Desa.

IV. Pemecahan Masalah (Usaha).

37. Apabila Bapak/Ibu menemui hambatan dalam perencanaan/ pelaksanaan pembangunan Desa, usaha apa yang Bapak/Ibu lakukan:
a. Membiarkan perencanan/pelaksanaan yang gagal.
b. Mengundang kembali Ketua seksi di LKMD.
c. Meminta bantuan KUPDK/Pembina LKMD Kecamatan, dan instansi yang terkait dalam pembangunan Desa.

38. Selanjutnya apabila Bapak/Ibu menemui hambatan dalam pelaksanaan yang disebabkan oleh salah seorang oknum tertentu di kalangan masyarakat, apa yang Bapak/Ibu lakukan:
a. Membiarkan oknum tersebut.
b. Melaporkan oknum tersebut kepada Camat dan Kepolisian
c. Mengundang pemuka-pemuka masyarakat/Kepala kaum/Kepala seksi guna merealisasi oknum tersebut.
d. Cukup ditangani oleh keamanan Desa saja.

39. Setiap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang jelas akan menimbulkan pengorbanan baik perasaan maupun material, bahkan sampai ratusan hektar tanah harus dikosongkan untuk pembangunan. Dalam hal ini usaha apa yang Bapak/Ibu lakukan.
a. LKMD hanya mematuhi saja kehendak pemerintah.
b. Pembangunan disetujui LKMD dengan penggantian material kepada masyarakat realistis, artinya dapat diterima oleh akal sehat dan tidak merugikan masyarakat.

V. Persepsi Pengurus LKMD Terhadap Pelaksana Program.

40. Pelaksanaan kegiatan program LKMD, selama pelita V, apakah menurut pendapat Bapak/Ibu sudah berjalan dengan baik?

41. Bila semua program LKMD dengan segala aspeknya terlaksana dengan baik, apakah menurut pendapat Bapak/Ibu keadilan, kesejahteraan masyarakat Desa akan cepat terwujud?

42. Bila kesejahteraan hidup rakyat di pedesaan sudah merata, apakah menurut pendapat Bapak/Ibu akan dapat menjamin stabilitas keamanan bangsa dan negara?

43. Guna meningkatkan kualitas kerja pengurus LKMD, apakah menurut pendapat Bapak/Ibu perlu diadakan suatu penataran khusus bagi pengurus LKMD di pedesaan?

LAMPIRAN 2

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
PUSAT PENELITIAN
Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus IKIP Air Tawar Padang Kode POS 25131
Telepon : 51260 Pesawat : 213 - 217

Nomor : 631/PT 37.H9/N-4.1.6/1992 15 Juli 1992
Lamp. : 1 (satu) Proposal penelitian
H a l : Mohon izin untuk mengumpulkan data penelitian.

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH Tk.I Sumbar
melalui:
Kepala Direktorat Sosial Politik
Provinsi Sumatera Barat
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan FPOK IKIP Padang tanggal 14 Juli 1992 Nomor: 1578/PT 37. H4.FPOK/N-1992 yang isinya seperti pokok surat ini, maka dengan ini kami mohon agar Bapak sudi memberi izin kepada staf pengajar IKIP Padang:

N a m a : Drs. Didin Tohidin
N I P : 130878086
Jur./Fak. : Pdd. KESREK/FPOK IKIP Padang

untuk mengumpulkan data penelitan dalam rangka menyelesaikan laporan:

J u d u l : STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD PADA DASA-DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN LUBUK ALUNG KAB. DATI II PADANG PARIAMAN.

Lokasi : Kec. Lubuk Alung

Waktu : 20 Juli s.d. 30 Agustus 1992.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,

Dr. Zainil,M.A
NIP 130187088

Tembusan Yth. .
1. Bapak Rektor IKIP Padang
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Padang Pariaman
3. Dekan FPOK IKIP Padabg
4. Camat Kec. Lubuk Alung
5. Ketua Jurusan Pdd. KESREK FPOK IKIP Padang
6. Kepala Desa/Lurah . . . . . .
7. Yang bersangkutan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADA

LAMPIRAN 3

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : Jalan Jand.Sudirman No.51 - Padang Telp.34224, 31401,31402.P.199.

R E K O M E N D A S I
No.B.070/1932/Sospol/VII / 1992.

T E N T A N G
IZIN MELAKUKAN PENELITIAN / SURVEY

Kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, setelah mempelajari surat Kepala Pusat Penelitian IKIP Padang Nomor 631/PT 37.H9/H-4.1.6/1992 tanggal 15 Juli - 1992 perihal mohon izin penelitian,

dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Daerah Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

N a m a	:	DRS. DIDIH TOHIDIH.
Tempat / Tanggal Lahir	:	Bandung, 18 Oktober 1958.
P e k e r j a a n	:	Dosen FPOK-IKIP Padang.
A l a m a t	:	Komplek FPOK IKIP Padang.
Nomor Kartu Identitas	:	IKIP.130878086.
Maksud / Tujuan Penelitian	:	Pengumpulan Data dengan judul " STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM LKMD PADA DESA-DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN LUBUK ALUNG KAB. DATI II PADANG PARIAMAN".
Lokasi / Tempat Penelitian	:	Kabupaten Padang Pariaman.
Waktu Penelitian	:	20 Juli s/d. 30 Agustus 1992.
A n g g o t a / Penelitian	:	Drs.Apri Agus, Drs. Daharis.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakannya dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah penelitiannya kepada PEMDA setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 2 (dua) eks kepada Gubernur KDH Tk.I Sumbar Cq.Kadit Sospol dan 1 (satu) eks kepada Bupati/Walo KDH Ybs.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

P a d a n g, 21 J u l i 1992.-
An. GUBERNUR KDH TINGKAT I SUMATERA BARAT
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK,
U/b. Kasubdit.Pengamanan,

Pembina, NIP.010035782.-

KEPADA : YBS.
TEMBUSAN :

1. Mendagri Cq. Dirjen Sospol di Jakarta.
2. Ketua BAKORSINAHASDA Sumbagut di Medan.
3. Dan Rem 032/Wirabraja di Padang.
4. Kapolda Sumbar di Padang.
5. Kajati Prop. Sumbar di Padang.
6. Ketua BAPPEDA Tk.I Sumbar di Padang.
7. Pembantu Gubernur Sumbar Wilayah III.
8. Bupati KDH. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]

= AP =

LAMPIRAN 4

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN

KANTOR CAMAT LUBUK ALUNG

Nomor : 070/427/Sospol/1992.
Lamp. : -
Prihal : Izin Penelitian.

Lubuk Alung , 28 Juli 1992.

KEPADA :
YTH. Sdr.Kepala Desa se Kec.
Lubuk Alung.
Di -
LUBUK ALUNG.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Bapak Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Padang Pariaman Nomor:B.070/67/Sospol/VII/;992 tanggal 24 Juli 1992,prihal - sebagai mana pokok surat diatas, bersama ini diberitahukan kepada saudara — bahwa akan datang ke Desa saudara untuk melakukan Penelitian seorang Dosen — FPOK - IKIP Padang :

N a m a	: Drs.Didin Tohidin.
Tempat/tanggal lahir	: Bandung/ 18 Oktober 1958.
P e k e r j a a n	: Dosen FPOK - IKIP Padang.
A l a m a t	: Komplek FPOK Ikip Padang.
Nomor Kartu Identitas	: NIP.130 878 086.
Maksud/Objek Penelitian	: Pengumpulan Data dengan Judul Study - tentang pelaksanaan kegiatan Prigram - LKMD pada Desa dalam Kec.Lubuk Alung.
L o k a s i Penelitian	: Semua Desa dalam Wilayah Kec.Lb.Alung.
Waktu Penelitian.	: 24 Juli s/d 30 Agustus 1992.
Anggota Peneliti	: Drs.Apri Agus, Drs.Daharis.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar saudara dapat memberikan - bantuan informasi,data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian tsbb. dan melaporkan hasil hasil penelitianya kepada kami. Dan kepada yang melakukan penelitian untuk dapat memperhatikan ketentuan rekomendasi penelitianya.

Demikianlah agar saudara maklum dan dapat dilaksanakan sebagai mana - mestinya.-

CAMAT LUBUK ALUNG,

(DRS.MARTIAS MAHYUDDIN)

PENATA/NIP.010 096 324.-

Tembusan :disampaikan kepada Yth.:

1.Bapak Bupati KDH.TK.II PD/Pariaman cq.Kakan Sospol di Pariaman.
2.Sdr.Dekan FPOK IKIP Padang di Padang.
3.Sdr. Yang bersangkutan.
4.A r s i p -----

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arifin. H.M, (1977), Psicologi Dakwah. Jakarta: Bulan Bintang.

Bappeda Sumbar, (1990), Kecamatan Padang Utara Dalam Angka.Padang: Statistik.

Bappeda, (1987), Padang Dalam Angka. Padang: Statistik

Biro Hukum Kantor Gubernur KDH TK I Sumatera Barat, (1992), Undang-Undang no 5 tahun 1979 tentang Peme-rintahan Desa. Padang.

Depag, RI, (1983), Alquran dan Terjemahannya. Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran.

Dep P & K, (1990), Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Habib Syafa'at, Drs, (1982), Pedoman Dakwah. Jakarta: Wijaya.

Hasmi, H, Prof, (1968), Dustur Dakwah Menurut Alquran. Jakarta: Bulan Bintang.

Helmi Masdar, Drs, (1970), Problematika Dakwah Islam. Semarang: CV. Toha Putera.

Natsir, M, (1981), Fiqhud Dakwah. Semarang: Rahmadhani.

Nazaruddin, SH, (1974), Publisistik Dan Dakwah. Jakarta: Erlangga.

Sanusi Salahuddin, Drs, (1964), Pembahasan Sekitar Prin-sip-prinsip Dakwah Islam. Semarang: CV. Rahmadani

Shaleh Rosyad, A, Drs, (1977), Management Dakwah Islam, Jakarta: Bulan Bintang.

Sihombing Bona Frans, Drs, (1991), Himpunan Penataran Lengkap Tentang Desa & Kelurahan., jakarta: Sinar Grafika.

Sudirwo Daeng, Drs, (1985), Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan Pemerintah Desa. Bandung: Angkasa.

Umar Toha Yahya, Prof, MA, (1967), Ilmu Dakwah. Jakarta: Wijaya.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG